

# HUBUNGAN POLITIK NAHDLATUL ULAMA DAN PEMERINTAH ORDE BARU



Oleh

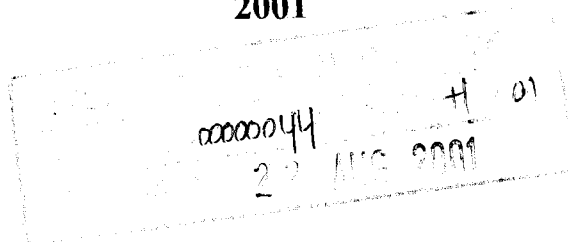
**Drs. H. Musthofa Sonhadji, M.A.**

**NIM. 83009**

**DISERTASI**

IX/6-6/2  
SON  
h  
C-1

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Doktor Dalam Ilmu Agama Islam  
Yogyakarta  
2001**



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

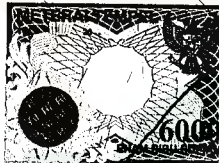
Nama : Drs. H. Musthofa Sonhadji, M.A

NIM : 83009

Jenjang : Doktor

Menyatakan, bahwa Disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Kudus, .....



yang menyatakan

Drs. H. Musthofa Sonhadji, M.A  
NIM. 83009



DEPARTEMEN AGAMA  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

DISERTASI berjudul : **KEHENDAK POLITIK HANDELATUL ULAMA DAN  
PESERIKTAH ORDE BARU**

Ditulis oleh : **Drs. H. Nurhafa Sorhadji, M.A.**

NIM : **83009 / 83**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
**Doktor dalam Ilmu Agama Islam**

Yogyakarta, 4 Agustus 2001



Rektor/Ketua Senat

*Abdullah*  
**Drs. H. Atho Muhsin**  
**NIP. 136077326**



DEPARTEMEN AGAMA  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA/PROMOSI

Nama : **DR. H. MURTHOFA SORHADJI, M.A.**  
 NIM : **83009 / 83**  
 Judul : **KEBIJAKAN POLITIK WANBLATUL ULAMA DAN  
PRESIDENSIAN ORDE BARU**

Ketua : **Prof. Dr. H.M. Atho Muhsin**

Sekretaris : **Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah**

- Anggota :
1. **Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif, M.A.**  
(Promotor I/Anggota Penguji I)
  2. **Prof. Dr. H. Faical Ismail, M.A.**  
(Promotor II/Anggota Penguji II)
  3. **Prof. Dr. H. Taufik Abdullah**  
(Anggota Penguji III)
  4. **Prof. Dr. H. Sunyoto Usman**  
(Anggota Penguji IV)
  5. **Prof. Dr. H. Kuntodjaya**  
(Anggota Penguji V)
  6. **Prof. Dr. H. Affan Ghaffar**  
(Anggota Penguji VI)
  7. **Dr. Rachman Hidayat, M.A.**  
(Anggota Penguji VII)
  8. -
  9. -

( *Thomash* )  
 ( *Amin* )  
 ( *Maarif* )  
 ( *Taufik* )  
 ( *Sunyoto* )  
 ( *Kuntodjaya* )  
 ( *Affan* )  
 ( *Rachman* )  
 ( )  
 ( )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal **4 Agustus 2001**  
 Pukul **13.00** sd **15.00** WIB.

Hasil/Nilai .....

Predikat : **Memuaskan/Sangat memuaskan/Dengan pujian \***

\*) Coret yang tidak sesuai



DEPARTEMEN AGAMA  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
PROGRAM PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

PROMOTOR I : Prof. Dr. H.A. Syafi'i  
Ma'arif, M.A.

PROMOTOR II : Prof. Dr. Faisal  
Ismail, M.A.



## Nota Dinas

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan disertasi berjudul :

### HUBUNGAN POLITIK NAHDLOTUL ULAMA DAN PEMERINTAH ORDE BARU

Yang ditulis oleh :

Nama : Drs. H. Musthofa Sonhadji, M.A  
NIM : 83009  
Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2000, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 16-7-2001

Rektor/ Ketua Senat



Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar  
NIP. 150077526

**Nota Dinas**

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat setelah melakukan bimbingan , telaah , arahan dan koreksi terhadap penulisan disertasi berjudul :

**HUBUNGAN POLITIK NAHDLUTUL ULAMA DAN  
PEMERINTAH ORDE BARU**

Yang ditulis oleh :

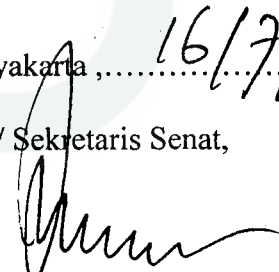
Nama : Drs. H. Musthofa Sonhadji, M.A  
NIM : 83009  
Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2000 , saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, ..... 16/7/2001

PR I/ Sekretaris Senat,

  
Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah  
NIP. 150216071

**Nota Dinas**

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat setelah melakukan bimbingan , telaah , arahan dan koreksi terhadap penulisan disertasi berjudul :

**HUBUNGAN POLITIK NAHDLUTUL ULAMA DAN  
PEMERINTAH ORDE BARU**

Yang ditulis oleh :

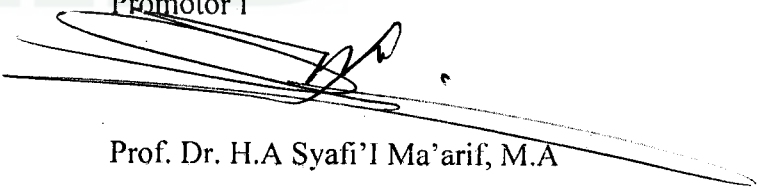
Nama : Drs. H. Musthofa Sonhadji, M.A  
NIM : 83009  
Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2000 , saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, *12 Juni 2007*

Promotor I

  
Prof. Dr. H.A Syafi'i Ma'arif, M.A



**Nota Dinas**

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat setelah melakukan bimbingan , telaah , arahan dan koreksi terhadap penulisan disertasi berjudul :

**HUBUNGAN POLITIK NAHDLOTUL ULAMA DAN  
PEMERINTAH ORDE BARU**

Yang ditulis oleh :

Nama : Drs. H. Musthofa Sonhadji, M.A  
NIM : 83009  
Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2000 , saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta , ..... 20 Juni 2001 .....

Promotor II



Prof. Dr. Faisal Ismail, M.A  
NIP. 150102060

**Nota Dinas**

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan disertasi berjudul :

**HUBUNGAN POLITIK NAHDLUTUL ULAMA DAN  
PEMERINTAH ORDE BARU**

Yang ditulis oleh :

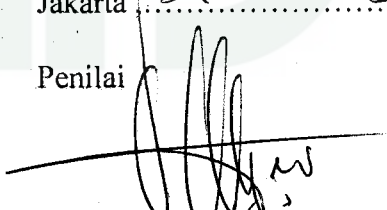
Nama : Drs. H. Musthofa Sonhadji, M.A  
NIM : 83009  
Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2000, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 21 - 2 - 2001

Penilai

  
Prof. Dr. H. Taufik Abdullah

## Nota Dinas

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan disertasi berjudul :

### **HUBUNGAN POLITIK NAHDLQUTUL ULAMA DAN PEMERINTAH ORDE BARU**

Yang ditulis oleh :

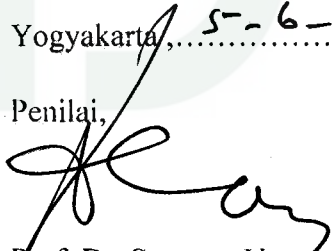
Nama : Drs. H. Musthofa Sonhadji, M.A  
NIM : 83009  
Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2000, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5-6-2001

Penilai,

  
Prof. Dr. Sunyoto Usman, M.A

**Nota Dinas**

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat setelah melakukan bimbingan , telaah , arahan dan koreksi terhadap penulisan disertasi berjudul :

**HUBUNGAN POLITIK NAHDLOTUL ULAMA DAN  
PEMERINTAH ORDE BARU**

Yang ditulis oleh :

Nama : Drs. H. Musthofa Sonhadji, M.A  
NIM : 83009  
Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2000 , saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5/6-2001.....

Penilai,



Prof. Dr. H. Affan Gaffar, M.A

**Nota Dinas**

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan disertasi berjudul :

**HUBUNGAN POLITIK NAHDLUTUL ULAMA DAN  
PEMERINTAH ORDE BARU**

Yang ditulis oleh :

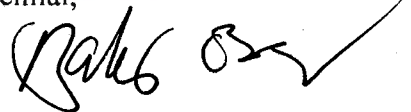
Nama : Drs. H. Musthofa Sonhadji, M.A  
NIM : 83009  
Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2000, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta .....

Penilai,



Dr. Bachtiar Effendi, M.A

## ABSTRAK

Studi tentang hubungan politik antara Islam dan pemerintahan di Indonesia menunjukkan adanya kondisi yang pasang surut, yaitu pola hubungan yang bercorak antagonistik, resiprokal-kritis dan akomodatif. Studi tentang Islam dan pemerintah Orde Baru dalam beberapa waktu terakhir, sebagaimana dinyatakan oleh Fachry Ali (1991), Afan Gaffar (1993), dan Abdul Azis Thaba (1996), menunjukkan adanya pola hubungan politik yang cukup akomodatif dari pemerintah Orde Baru terhadap gerakan Islam.

Disertasi ini hendak meninjau lebih lanjut dalam kaitannya dengan adanya sinyalemen sejumlah studi tersebut. *Pertama*, disertasi ini ingin meninjau lebih lanjut, apakah pola hubungan politik akomodatif yang diperlihatkan pemerintah Orde Baru tersebut berlaku bagi semua kalangan dalam gerakan Islam. *Kedua*, secara lebih khusus, disertasi ini akan menjawab pertanyaan, apakah kalangan Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bagian dari gerakan Islam juga masuk dalam kerangka akomodasi politik pemerintah Orde Baru.

Berdasarkan rekonstruksi historis terhadap perjalanan NU sebagai organisasi Islam yang secara terang-terangan membela paham *ahlussunnah wal jama'ah*, disertasi ini menemukan sejumlah fenomena yang intinya dapat dinyatakan bahwa akomodasi politik dari pemerintah Orde Baru, terutama yang mulai ditunjukkan pada akhir era 1980-an hingga pertengahan 1990-an, ternyata NU tidak masuk dalam kerangka akomodasi politik tersebut. Dalam batas-batas tertentu, disertasi ini justru

menunjukkan adanya pola hubungan berupa peminggiran atau penyingkiran politik oleh pemerintah Orde Baru terhadap NU.<sup>4</sup>

Peminggiran politik merupakan salah satu strategi dari pemerintah Orde Baru yang memiliki karakter politik otoriter-birokratik-developmental-korporatis. Pemerintah Orde Baru yang merupakan kolaborasi antara militer, teknokrat sipil dan pemodal besar, memiliki beberapa ciri utama : (1) elit pemerintahan berada pada oligarki militer sebagai lembaga, didukung oleh teknokrat sipil, dan kalangan bisnis, (2) dalam pengambilan keputusan politik cenderung terisolasi hanya sebatas pada lingkaran elit pemerintah dan otonom dari partisipasi politik masyarakat, (3) proses pengambilan keputusan cenderung birokratik dan mengabaikan proses tawar-menawar dengan berbagai kelompok masyarakat yang berkepentingan, (4) sebagai konsekuensi dari beberapa karakter tersebut adalah demobilisasi massa dan melakukan kontrol represif terhadap kelompok oposisi yang ada dalam masyarakat. Karakter politik pemerintah Orde Baru yang demikian ini merupakan konsekuensi dari pilihan politik strategis terhadap pembangunan. Dalam kerangka untuk mengamankan suksesnya proses pembangunan ekonomi, maka penciptaan stabilitas politik merupakan sebuah keharusan yang harus ditempuh pemerintah Orde Baru.

Kekhawatiran terhadap munculnya ancaman gangguan yang dapat mendestabilisasikan pembangunan, maka pemerintah Orde Baru menjalankan strategi korporatisme. Korporatisme ini pada dasarnya adalah upaya pemerintah untuk mengelompokkan masyarakat ke dalam beberapa organisasi sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan upaya tersebut dalam rangka pengendalian politik pemerintah



terhadap masyarakat. Korporatisme pemerintah Orde Baru dijalankan dengan dua cara. *Pertama*, bagi kelompok masyarakat yang memberikan dukungan dan keuntungan bagi pemerintah, maka korporatisasi terhadap kelompok ini akan berupa akomodasi politik, atau masuk dalam kerangka *political inclusion*. *Kedua*, bagi kelompok masyarakat yang memiliki potensi mengancam stabilitas, maka korporatisasi pemerintah digunakan untuk “menjinakkannya”. Apabila upaya “penjinakan” ini tidak efektif, maka pemerintah Orde Baru akan melanjutkannya dengan penyingkiran politik (*political exclusion*).

NU adalah satu di antara organisasi Islam yang memiliki sejarah panjang, dan hingga kini masih hidup. NU memiliki pengalaman sebagai organisasi sosial keagamaan sejak kelahirannya pada tahun 1926. Kekecewaan yang dialami NU selama bergabung dalam partai politik Islam Masyumi, membawanya keluar dari Masyumi dan secara mandiri berdiri menjadi partai politik pada tahun 1952. Pada era Demokrasi Liberal/Parlementer di mana NU ikut dalam pemilu 1955, ternyata mampu tampil sebagai urutan ketiga setelah PNI dan Masyumi, dan satu tingkat di atas PKI.

Pengalaman NU sebagai partai politik ini berlanjut hingga era Demokrasi Terpimpin. Pada era ini Soekarno menjalankan paham Nasakom, di mana kekuatan politik yang terwakili di dalamnya adalah PNI dari unsur nasionalis, NU dari unsur agama, dan PKI dari unsur komunis. Pada era ini NU tampil sebagai partai Islam terbesar, menyusul dibubarkannya Masyumi oleh Soekarno karena tuduhan atas keterlibatan sejumlah aktifisnya dalam beberapa pemberontakan daerah. Sejumlah



kalangan menilai bahwa karena sikap oportunistnya sajalah, NU mampu bertahan dalam era Demokrasi Terpimpin. Namun demikian, yang patut dicatat adalah NU mampu bertahan sebagai organisasi yang mewakili kepentingan kelompok Islam.

Pengalaman NU dalam kehidupan politik masih berlanjut hingga era Orde Baru. Sejak awal berdirinya Orde Baru, hubungan antara NU dengan pemerintah Orde Baru mulai menunjukkan ketegangan-ketegangan. NU masih tampil sebagai partai politik yang independen pada pemilu 1971. Bahkan pada pemilu ini, NU berhasil menduduki posisi kedua setelah Golkar (partai pemerintah sebagai sayap sipil dari politik militer). Sejak tahun 1973, NU masuk dalam politik penyederhanaan partai (fusi), dan bergabung dengan beberapa partai politik Islam lainnya dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal ini menunjukkan bahwa NU masih tetap berkiprah dalam dunia politik, walaupun tidak semata-mata atas nama NU lagi, namun sudah terlebur dalam PPP.

Ketegangan-ketegangan politik, yang pada gilirannya membawa kepada kerenggangan hubungan antara kelompok Islam politik dengan pemerintah Orde Baru muncul berkaitan dengan berbagai isu yang muncul ke permukaan. Isu-isu tersebut di antaranya adalah keinginan Piagam Jakarta mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, isu yang berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan, isu diakuinya secara resmi aliran kepercayaan dalam GBHN, dan isu seputar asas tunggal Pancasila.

NU sebagai salah satu kekuatan politik Islam juga mengalami ketegangan hubungan dengan pihak pemerintah Orde Baru terutama pada era 1970-an hingga

awal 1980-an. Pada titik ini NU berputar haluan, mengubah dirinya dari partai politik di mana NU menjadi bagian dari PPP, berubah menjadi organisasi sosial keagamaan yang dikenal dengan sebutan kembali ke Khittah 1926. Pertimbangan yang digunakan NU untuk keluar dari arena politik formal ini terutama karena sistem politik yang dibangun pemerintah Orde Baru tidak memberikan kemungkinan partisipasi politik secara aktif, dan tidak memberikan kemungkinan masyarakat luas terlibat dalam pembentukan kebijakan publik. Oleh karena itu, kembali kepada organisasi sosial dan keluar dari kehidupan politik formal menjadi pilihan utama yang ditempuh NU.

Ketegangan antara pemerintah Orde Baru dengan kalangan gerakan Islam menunjukkan tanda-tanda mereda dan dilanjutkan dengan pola akomodasi politik, terutama sejak akhir era 1980-an dan awal 1990-an. Puncak dari akomodasi politik pemerintah Orde Baru itu ditandai dengan dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Akomodasi politik ini tidak terjadi begitu saja, namun diawali oleh sejumlah fenomena lainnya yang berkaitan. Sejak awal era Orde Baru, di luar pergerakan partai politik Islam, sejumlah aktifis Islam terlibat aktif dalam gerakan di luar gerakan kepartaian. Gerakan Islam di luar jalur kepartaian ini pada umumnya dimotori oleh kalangan intelektual muslim. Menurut para aktifis kalangan ini, memperjuangkan Islam tidak semata-mata lewat jalur partai, dan dapat diperjuangkan lewat jalur lain. Bersamaan dengan munculnya kelas menengah muslim yang terdidik secara luas ini, dan redanya ketegangan antara pemerintah Orde Baru dengan kalangan gerakan Islam

pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, maka pada titik inilah terjadi akomodasi politik pemerintah Orde Baru terhadap kalangan Islam.

Namun demikian, disertasi ini menunjukkan bahwa hubungan akomodasi politik tersebut tidak menyentuh semua kalangan gerakan Islam. NU sebagai bagian dari gerakan Islam pada era Orde Baru ini, baik ketika sebagai partai politik mandiri, atau pada saat tampil sebagai kekuatan politik dalam PPP, dan hingga keluar dari PPP dan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan, lebih banyak dalam posisi marjinal dan tersingkir secara politik dalam hubungannya dengan pemerintah Orde Baru.

Disertasi ini menunjukkan bahwa pola hubungan marginalisasi politik tersebut disebabkan oleh perbedaan karakter antara NU dengan pemerintah Orde Baru. Di satu pihak, NU adalah organisasi sosial keagamaan yang bercorak tradisional, berorientasi untuk memperjuangkan agar paham *ahlussunnah wal jama'ah* tetap dapat dipraktekkan, berbasis masyarakat pedesaan, dan di bawah pola kepemimpinan kharismatik kyai. Corak hubungan yang demikian ini tentu memiliki potensi hubungan yang kuat antara organisasi dengan basis sosial pendukungnya. Pada kehidupan politik, corak yang demikian ini memiliki potensi politik yang besar.

Di sisi lain, pemerintah Orde Baru lebih berorientasi kepada pembangunan ekonomi, dengan membangun aliansi strategis dengan kalangan pemodal asing yang kuat dan didukung oleh kalangan militer. Corak sistem politik yang demikian ini, tidak menghendaki adanya organisasi yang mempunyai ikatan yang kuat dengan basis sosial pendukungnya. Dalam kerangka inilah, hubungan politik pemerintah Orde Baru dengan kalangan Nahdlatul Ulama ditandai dengan peminggiran politik.

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kemampuan dan kekuatan sehingga pada akhirnya disertasi ini dapat diselesaikan. Panjang waktu yang terlewat semenjak mata kuliah program S-3 secara teoritis dapat penulis selesaikan pada tahun 1987. Baru saat ini penulis dapat menyelesaikan disertasi ini, tidak lain disebabkan karena berbagai kegiatan dan amanat yang harus penulis laksanakan, di antaranya adalah sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Kudus selama dua periode (tahun 1987-1991 dan tahun 1991-1995), dan banyak terlibat dalam jaringan perjuangan dan pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, terselesaikannya disertasi ini merupakan anugerah dan nikmat Allah yang tiada terhingga.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian disertasi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atas berbagai bantuan tersebut.

Pertama-tama rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H.M. Atho' Mudzhar, selaku Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang secara langsung maupun tidak langsung memungkinkan penulis menyelesaikan disertasi pada program doktor. Rasa terima kasih penulis sampaikan juga kepada pengelola Program Doktor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap staf pengajarnya.

Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. H.A. Syafi'i Ma'arif, M.A. dan Prof. Dr. Faisal Ismail, M.A., keduanya adalah promotor

dalam penulisan disertasi ini. Suasana akrab yang mereka ciptakan selama proses bimbingan, serta kesabaran dan kejelian mereka, akhirnya membuahkan disertasi ini. Rasa terima kasih, penulis sampaikan juga kepada para anggota tim penguji yang telah memberikan penilaian dan kritik terhadap penulisan disertasi ini pada ujian disertasi tertutup pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2000. Mereka adalah Prof. Dr. H.M. Atho' Mudzhar, Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, Prof. Dr. H.A. Syafi'i Ma'arif, Prof. Dr. Faisal Ismail, Prof. Dr. Taufik Abdullah, Prof. Dr. Sunyoto Usman, Prof. Dr. Afan Gaffar, dan Dr. Bachtiar Effendi.

Penulis tak lupa pula menyampaikan terima kasih kepada para kolega dan teman sejawat di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IAIN Walisongo Semarang dan STAIN Kudus. Terutama kepada Dr. A. Qodry Azizi, Dr. Abdul Djamil dan Dr. Abdurrahman Mas'ud, yang dalam diskusi-diskusi awal penyusunan proposal disertasi ini memberikan masukan-masukan yang cukup berarti.

Rasa terima kasih penulis sampaikan pula kepada para pengelola perpustakaan di mana penulis menjadikannya sebagai sumber informasi untuk penulisan disertasi ini. Mereka adalah pengelola perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, perpustakaan UGM Yogyakarta, perpustakaan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU di Jakarta, dan Pusat Data dan Analisa Tempo di Jakarta. Tanpa bantuan mereka kiranya penulis akan kesulitan mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan.

Yang tak kalah pentingnya penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu penulis, K.H. Sonhadji dan Hj. Mariyatun almarhumain,

yang telah menanamkan pendidikan awal pada diri penulis, dan dengan doa restu mereka berdua, penulis sampai pada jenjang tertinggi pada pendidikan formal. Tiada kata lain yang dapat penulis sampaikan kecuali hanya dapat berdoa agar mereka mendapatkan ampunan dan analnya diterima Allah sebagai amal jariyah.

Kepada Hj. Rusyidah, istri penulis, yang telah setia mendampingi dan memberikan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih, dan karenanya disertasi ini dipersembahkan kepadanya. Ucapan terima kasih tak lupa juga penulis sampaikan kepada anak-anak penulis: Hasyim Asy'ari dan Siti Mutmainah istrinya, serta Alef Sa'di Umam, yang juga memberikan dorongan moril agar penulis menyelesaikan disertasi yang sudah agak lama tertunda.

Banyak pihak kiranya yang cukup berperan dalam studi penulis. Tanpa dapat menyebutkan satu per satu, penulis tetap ingin berterima kasih kepada mereka semua. Salah satu cara yang mungkin penulis lakukan untuk mengucapkan rasa terima kasih itu adalah menyebutkan nama dan ide-ide pemikiran mereka dalam kutipan yang ada di sepanjang disertasi ini. Semoga semua amal baik mereka mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah SWT.

Sebagaimana lazimnya sebuah karya manusia, disertasi ini tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka mengundang saran dan kritik guna memperbaiki karya ini. Tanpa mengabaikan jasa berbagai pihak dalam memberikan masukan atas disertasi ini, penulislah yang bertanggung

jawab atas segala tafsiran yang muncul dalam disertasi ini. Namun demikian, penulis tetap berharap disertasi ini dapat memberikan manfaat.

Kudus, 12 Rabiul Awal 1421 H  
15 Juni 2000 M

Penulis

H. Musthofa Sonhadji





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN REKTOR .....	iii
DEWAN PENGUJI .....	iv
PENGESAHAN PROMOTOR .....	v
NOTA DINAS .....	vi
ABSTRAK .....	xiv
KATA PENGANTAR .....	xx
DAFTAR ISI .....	xxiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	9
C. Tujuan Penulisan .....	12
D. Manfaat Penulisan .....	13
E. Signifikansi Penulisan .....	13
F. Kajian Pustaka .....	14
G. Kerangka Teoritik .....	20
H. Metode Penulisan .....	25
I. Sistematika Penulisan .....	26



<b>BAB II AKAR-AKAR HISTORIS NAHDLATUL ULAMA</b> .....	28
A. Kebangkitan Ulama Tradisional .....	28
B. Nahdlatul Ulama dan <i>Ahlussunnah wal Jama'ah</i> .....	46
C. Basis Sosial Nahdlatul Ulama .....	55
D. Nahdlatul Ulama dan Politik .....	69
<b>BAB III MUNCULNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU</b> .....	82
A. NU dan Demokrasi Terpimpin Soekarno .....	82
B. Runtuhnya Rezim Demokrasi Terpimpin .....	101
C. Terbentuknya Koalisi Pendukung Orde Baru :	
Militer, Teknokrat dan Pemilik Modal .....	107
D. Restrukturisasi Sosial, Ekonomi dan Politik :	
Developmentalisme dan Pembangunanisme Sebagai Ideologi .....	113
E. Model Kepolitikan Orde Baru .....	124
<b>BAB IV MARJINALISASI POLITIK PEMERINTAH ORDE BARU</b>	
<b>TERHADAP NAHDLATUL ULAMA</b> .....	129
A. Partai Nahdlatul Ulama dan Militer : Depolitisasi Islam .....	129
B. NU dalam Partai Persatuan Pembangunan : Deideologisasi Islam .....	147
C. Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah 1926 .....	154
D. Nahdlatul Ulama dan Politisasi Islam .....	169

**BAB V KESIMPULAN** ..... 179

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 188

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS**





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah hubungan Islam dan pemerintah terdapat suatu paralelisme sejarah. Sejarawan Kuntowijoyo misalnya, menyebutkan bahwa dalam perspektif historis-diakronis, hubungan Islam dan pemerintah menunjukkan pola paralelisme historis.<sup>1</sup> Kecenderungan paralelisme itu berbentuk tiga pola hubungan, yaitu alienasi, oposisi dan integrasi. Ketiga pola itu berulang kali muncul ke permukaan dalam periode-periode sejarah tertentu.

Islam menunjukkan posisi alienasi politik dan berubah menjadi kekuatan oposisional terhadap kekuasaan pemerintahan Majapahit, terlihat sejak kurun embrio terbentuknya kerajaan Islam Demak. Beralihnya kekuasaan Islam ke wilayah pedalaman (Mataram Islam), menyusul jatuhnya Demak (wilayah pesisir) diikuti pula perubahan pola hubungan antara Islam dan pemerintah. Kalau pada periode Demak terlihat betapa terintegrasinya Islam dan pemerintahan, semenjak kekuasaan beralih ke pedalaman, corak sinkretisme agama telah membawa Islam sebagai kekuatan oposisional utama terhadap negara. Setidak-tidaknya demikian kesimpulan dari

---

<sup>1</sup> Kuntowijoyo, 1991, *Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung : Mizan), hlm. 138-156.

interpretasi sejarah terhadap beberapa literatur Jawa klasik, termasuk di dalamnya Serat Cebolek.<sup>2</sup>

Demikian pula pada kurun kolonialisme Belanda, Islam tampil pula ke permukaan sebagai kekuatan oposisional. Kalau pada awalnya Islam terkungkung pada kondisi yang alienatif terhadap kekuasaan pemerintahan kolonial, semenjak munculnya kesadaran diri yang dipicu oleh organisasi-organisasi Islam modern semacam Sarekat Islam, ia telah berubah wujud menjadi kekuatan oposisional terhadap pemerintah.<sup>3</sup> Islam dan negara kembali menunjukkan hubungan yang integratif ketika revolusi kemerdekaan melahirkan *nation-state* yang kemudian disebut Indonesia.

Semenjak kemerdekaan, kekuatan Islam seperti berada di rumahnya sendiri. Namun hubungan yang integratif ini tidak berlangsung lama. Islam kembali menunjukkan sikap oposisionalnya ketika dasar negara Indonesia tidak berdasarkan kepada Islam.<sup>4</sup> Unjuk kekuasaan yang begitu bercorak ideologis antara kubu

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 123-137.

<sup>3</sup> Lihat, misalnya : Takashi Shiraishi, 1990, *An Age in Motion : Popular Radicalism in Java, 1912-1926*, (Ithaca : Cornell University Press), hlm. 55-107. Juga, Deliar Noor, 1980, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta : LP3ES), hlm. 114-170; A.P.E. Korver, 1985, *Sarekat Islam : Gerakan Ratu Adil ?*, (Jakarta : Grafiti Pers), hlm. 1-10.

<sup>4</sup> Untuk periode yang berdekatan dengan pra dan pasca revolusi kemerdekaan, baca : George McTurnan Kahin, 1952, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, (Ithaca : Cornell University Press), hlm. 185-267 ; Herberth Feith, 1961, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Ithaca : Cornell University Press).

nasionalisme dan Islam, diakhiri dengan kemenangan pihak yang pertama. Sejak itulah Islam kembali menjadi faksi politik yang cenderung oposisional. Puncaknya adalah eliminasi kekuatan politik Masyumi oleh rezim Soekarno.

Demikian pula pada kurun Orde Baru terdapat semacam paralelisme sejarah, sebagaimana dipahami oleh sejarawan. Keterlibatan kekuatan politik Islam dalam menumbangkan rezim Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno, menumbuhkan iklim baru bagi Islam untuk terintegrasi kembali dalam tubuh pemerintah Orde Baru. Angin segar bagi Islam pada awal Orde Baru itu nampaknya berhembus begitu saja, sambil sesekali melupakan jasa-jasa Islam dalam membidani kelahiran Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto.

Tidak segera direhabilitasinya Masyumi dan begitu dibatasinya keterlibatan aktif tokoh-tokoh bekas pemimpin Masyumi dalam panggung politik nasional, agaknya sebagai awal termarginalisasinya kembali Islam dari pemerintah. Ketika Nahdlatul Ulama memperoleh urutan kedua suara terbanyak setelah Golkar dalam pemilu 1971, menjadikan posisi Islam dalam kubu oposisi pemerintah.<sup>5</sup>

Walaupun pucuk pimpinan NU Idham Chalid pada awal Orde Baru dipilih menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada tahun 1967-1970 dan Menteri Sosial ad-interim 1970-1971, hal ini lebih karena peranan Ali Murtopo, salah

---

<sup>5</sup> Baca : Martin van Bruinessen, 1994, *NU : Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta : LKIS), terutama bab "NU dan Orde Baru, Hubungan Yang Tak Mengenangkan", hlm. 90-114. Juga Andree Feillard, 1996, "Traditionalist Islam and the Army in Indonesia's New Order : The Awkward Relationship", dalam Greg Barton and Greg Fealy (eds.), 1996, *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia*, (Clayton : Monash Asia Institute), hlm. 42-67.

seorang arsitek Orde Baru, yang memandang Idham sebagai pemimpin Islam yang lunak dan dapat diajak kerja sama. Namun hal ini bukan berarti wajah NU tunggal, karena di dalamnya terdapat juga tokoh muda Subchan Z.E. yang bersaing ketat dengan Idham untuk menduduki kursi kepemimpinan NU. Subchan merupakan salah seorang pemimpin pemuda pada masa awal Orde Baru, selanjutnya menjadi tokoh pengkritik utama berbagai kebijakan politik Orde Baru.

Demikian pula sikap oposisi NU semakin terlihat jelas ditunjukkan oleh K.H. Bisri Syansuri, Rais Aam NU menggantikan kedudukan yang ditinggal wafat K.H. Wahab Chasbullah. Pada tahun 1973 sikap oposisi NU terhadap pemerintah ditunjukkan kepada rencana undang-undang perkawinan yang dinilai tidak berdasar syariat Islam. Demikian juga pada tahun 1978 ketika Sidang Umum MPR memasukkan aliran kepercayaan ke dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), kubu NU dalam PPP menunjukkan sikap oposisinya dengan melakukan *walk out* ketika dilakukan voting terhadap rancangan GBHN tersebut.

Kecenderungan semakin termarginalisasinya kekuatan Islam dalam percaturan politik ini di antaranya karena pemerintah Orde Baru mengadopsi paradigma modernisasi dalam menjalankan politiknya. Melalui paradigma modernisasi ini, semua kekuatan politik yang berbasis pada ideologi dipangkas habis. Serangkaian restrukturisasi sosial dan politik, menempatkan kekuatan politik berdasar Islam

dalam posisi yang semakin tidak relevan pada kurun awal Orde Baru.<sup>6</sup> Posisi Islam semakin termarginalisasi, manakala format politik Orde Baru dipegang oleh koalisi kubu militer, teknokrat sekuler dan para pemilik kapital.<sup>7</sup> Jalinan koalisi ini semakin menguat dalam paradigma pembangunan yang dipilih oleh Orde Baru. Bahkan tak jarang wajah politik Orde Baru berbentuk sangat teknokrat-birokratis dengan dibimbing oleh program-program yang sekuler-pragmatis.

Islam kembali mendapatkan posisi yang agak akomodatif dalam pemerintahan ketika generasi muda Islam yang terdidik lulusan perguruan tinggi muncul ke permukaan. Program pembaharuan pemikiran Islam yang dimotori para mantan aktivis mahasiswa Islam, semacam Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, M. Dawam Rahadjo dan Abdurrahman Wahid, mendapatkan respon yang cukup luas di kalangan masyarakat Islam pada umumnya.<sup>8</sup>

Perubahan orientasi dari “Islam politik” ke “Islam kultural” dengan jargon “Islam, Yes; Partai Islam No”, agaknya menjadikan Islam semakin terintegrasi ke dalam pemerintahan. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari pola respon pemikiran Islam atas modernitas.<sup>9</sup> Sikap yang cukup positif terhadap modernitas dari kalangan

<sup>6</sup> Mohtar Mas'od, 1989, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta : LP3ES), terutama bab “Menciptakan Tertib Politik”, hlm. 132-196. Lihat juga : Afan Gaffar, 1993, “Islam dan Politik dalam Era Orde Baru, Mencari Bentuk Artikulasi Yang Tepat”, *Ulumul Qur'an*, No. 2, Vol. IV, 1993.

<sup>7</sup> Lihat : Richard Robison, 1990, *Power and Economy in Suharto's Indonesia*, (Manila : Journal of Contemporary Asia Publishers), terutama bab “Towards a Class Analysis of the Indonesian Military Bureaucratic State”, hlm. 9-31. Bandingkan : Mas'od, *ibid.*, hlm. 59-126.

<sup>8</sup> Kajian tentang hal ini, lihat : Bahtiar Effendy, 1995, “Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia”, *Prisma*, No. 5, hlm. 3-28.

<sup>9</sup> Nurcholish Madjid, 1987, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung : Mizan), hlm. 171-260.



intelektual muda Islam ini, nampaknya menemukan persinggungan dengan paradigma modernisme yang diadopsi pemerintah dalam menjalankan pembangunan. Dengan demikian menunjukkan sikap yang --dalam batas-batas tertentu-- semakin akomodatif dari pemerintah terhadap Islam.<sup>10</sup>

Puncaknya adalah diterimanya Pancasila oleh semua organisasi sosial-keagamaan Islam sebagai satu-satunya asas organisasi, sekalipun diwarnai dengan perdebatan yang keras. Penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas itu merupakan pilihan strategis kubu Islam, agar dalam mengartikulasikan kepentingannya organisasi Islam dapat diterima oleh pemerintah, dan menghilangkan kekhawatiran dari eliminasi politik oleh pemerintah.<sup>11</sup>

Indikator-indikator hubungan yang bercorak akomodatif antara pemerintah dan Islam terlihat dengan diterimanya usul pihak Islam dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, diterimanya UU Peradilan Agama, diperbolehkannya siswa-siswa muslimah menggunakan jilbab, dibentuknya bank Muamalat dan sejenisnya.

Hubungan "mesra" antara pemerintah dan Islam itu menemukan artikulasinya yang semakin kuat pada saat terbentuknya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim

---

<sup>10</sup> Lihat : Fachry Ali, 1991, "Akomodasi Non-Politik Islam Indonesia dalam Struktur Orde Baru", *Prisma*, No. 3, hlm. 87-96. Bandingkan : Zifirdaus Adnan, 1992, "Islamic Religion : Yes, Islamic (Political) Ideology : No ! Islam and The State in Indonesia", dalam Arief Budiman (ed.), 1992, *State and Civil Society in Indonesia*, (Clayton : Centre of Southeast Asian Studies Monash University), hlm. 441-477.

<sup>11</sup> Douglas E. Ramage, 1995, *Politics in Indonesia : Democracy, Islam and The Ideology of Tolerance*, (London and New York : Routledge), hlm. 45-74. Lihat juga : M. Bambang Pranowo, 1992, "Which Islam and Which Pancasila ? Islam and The State in Indonesia : A Comment", dalam Arief Budiman (ed.), *ibid.*, hlm. 479-502.

Indonesia). ICMI yang dibentuk pada akhir dasawarsa 1980-an itu oleh banyak kalangan disebut sebagai puncak akomodasi pemerintah terhadap Islam.

Kelahiran ICMI ini menimbulkan dua interpretasi. *Pertama*, kelahiran ICMI secara sosiologis adalah hal yang wajar, karena adanya mobilisasi vertikal sebagian kalangan Islam. Berkah ekonomi yang dirasakan sebagian kalangan Islam, memberinya kesempatan untuk memperoleh pendidikan umum yang lebih baik. Dengan demikian kalangan Islam ini mendapatkan kesempatan untuk mewarnai birokrasi Orde Baru. Untuk interpretasi ini sering dikenal dengan istilah “santrinisasi birokrasi”.<sup>12</sup>

Interpretasi *kedua*, memandang kelahiran ICMI lebih sebagai bentuk representasi kepentingan pemegang kekuasaan, ketimbang demi kepentingan Islam sendiri.<sup>13</sup> Pembentukan ICMI, menurut interpretasi ini, lebih karena untuk mencari dukungan dan legitimasi dari kalangan Islam dalam melangsungkan kekuasaan Presiden Soeharto. Alasan ini muncul ke permukaan menyusul berkurangnya pengaruh Presiden Soeharto di tubuh militer.<sup>14</sup> Untuk menciptakan keseimbangan tersebut, Soeharto mencoba berpaling kepada kekuatan Islam. Sebagai

<sup>12</sup> Interpretasi ini di antaranya diwakili oleh Robert W. Hefner, 1995, *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia*, terj., (Yogyakarta : Tiara Wacana), hlm. 19-36. Juga : Aswab Mahasin, 1993, “Kelas Menengah Santri : Pandangan dari Dalam”, dalam Richard Tanter dan Kenneth Young (eds.), 1993, *Politik Kelas Menengah Indonesia*, terj., (Jakarta : LP3ES0, hlm. 151-159.

<sup>13</sup> Bandingkan : R. William Liddle, “Religion As A Political Resource in An Authoritarian Regime : ICMI and The Future of Islamic Politics in Indonesia”, *unpublished paper*, The Ohio State University, tanpa tahun.

<sup>14</sup> Lihat : Adam Schwarz, 1994, *A Nation in Waiting : Indonesia in the 1990s*, (New South Wales : Allen and Unwin), terutama bab “Islam : Coming in from the cold ?”, hlm. 162-193.

kompensasinya, beberapa jabatan politik diberikan kepada kalangan Islam dari kubu ICMI. Bagi interpretasi ini muncul istilah “birokratisasi santri”.

Sebenarnya fenomena lahirnya ICMI ini sulit dilihat dari segi “siapa memanfaatkan siapa”. Karena berdasar dua interpretasi tersebut, kedua belah pihak nampaknya saling memanfaatkan peluang yang sama-sama terbuka.

Hubungan Islam dan pemerintah Orde Baru yang tampak tersebut seringkali dipolakan dalam tiga bentuk, yaitu hubungan yang antagonistik, resiprokal-kritis dan akomodatif.<sup>15</sup> Dalam periodisasi waktu, hubungan antagonis itu terjadi pada kurun waktu 1966-1982, hubungan resiprokal-kritis tampak pada 1982-1985, sementara hubungan akomodatif terlihat semenjak 1985 hingga kini.

Hubungan Islam dan politik (negara) yang terlihat begitu intens dan panjang di Indonesia hingga kurun Orde Baru itu, tidak terlepas dari persoalan asumsi politik Islam yang bersifat “teologis”, “historis”, dan “sosiologis”. Kenyataan sosiologis menunjukkan bahwa secara kuantitatif mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Oleh karena itu wajar bila umat Islam menanggung beban tanggung jawab sejarah dalam semua kurun waktu. Tentu saja keterlibatan Islam dalam politik

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz Thaba, 1996, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta : Gema Insani Press), hlm. 239-301. Kecenderungan hubungan akomodasi negara Orde Baru terhadap Islam ditunjukkan oleh Afan Gaffar, 1993, “Politik Akomodasi Islam dan Negara di Indonesia”, dalam M. Imam Azis (ed.), 1993, *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, (Jakarta : Gramedia).

itu tidak lepas dari berbagai pertimbangan teologis sebagai unsur transenden dari segenap tindakan pengamalan keagamaan.<sup>16</sup>

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan gambaran di atas, dapat dimunculkan pertanyaan : Apakah pola umum hubungan antara Islam dan pemerintah itu juga berlaku pada Nahdlatul Ulama (NU) ? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan politik NU dan pemerintah Orde Baru ?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dikemukakan mengingat beberapa alasan berikut. *Pertama*, NU merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan yang mampu bertahan dalam kurun waktu yang lama.<sup>17</sup> NU memiliki kenyataan sejarah bahwa ia mampu melampaui sejumlah kurun waktu kekuasaan, sejak masa kolonial Belanda dan kolonial Jepang (pra-kemerdekaan). Demikian pula pada masa pasca kolonial, NU tetap dapat bertahan melampaui berbagai pemerintahan yang berkuasa : mulai Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin, hingga era Orde Baru. Tentu saja daya tahan yang dimiliki NU ini tidak terlepas dari pilihan strategi yang ditempuhnya.

---

<sup>16</sup> Taufik Abdullah, 1987, *Islam dan Masyarakat : Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta : LP3ES), hlm. 37-39.

<sup>17</sup> Mohammad Fajrul Falaakh, 1994, "Jam'iyah Nahdlatul Ulama : Kini, Lampau dan Datang", dalam Ellyasa K.H. Darwis (ed.), 1994, *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta : LKIS), hlm. 165-194.

*Kedua*, kepolitikan Orde Baru menunjukkan kecenderungan model yang birokratik. Model *bureaucratic polity* yang dikemukakan Karl D. Jackson menunjukkan bahwa kepolitikan Orde Baru lebih ditentukan oleh lingkaran elit birokrasi baik sipil maupun militer.<sup>18</sup> Hampir semua keputusan politik ditentukan oleh lingkaran elit birokrasi, dan terkesan tidak begitu memperhatikan aspirasi masyarakat luas. Masyarakat, pada model kepolitikan semacam ini, menjadi termarginalisasi secara politik. Walaupun masyarakat terlibat secara politik, itu hanya sebatas pada *political implementation*, sementara pada tingkat *agenda setting* dan *policy formulation* tetap berada di kalangan elit birokrasi.

*Ketiga*, sejak memegang tampuk kekuasaan pemerintahan, Orde Baru merupakan jalinan koalisi besar antara militer, birokrasi dan pemilik modal (asing dan Cina).<sup>19</sup> Pada format yang seperti ini tentu saja dapat dilihat bahwa pada tingkat pelaksanaan pembangunan dan yang memperoleh hasil-hasilnya sebagian besar adalah anggota koalisi tersebut. Sementara masyarakat luas, terutama petani kecil, buruh, nelayan dan pedagang kecil berada di luar jangkauan format tersebut.

*Keempat*, kenyataan menunjukkan bahwa paradigma modernisme pada era Orde Baru menduduki posisi yang kuat. Semua upaya restrukturisasi sosial, ekonomi, politik dan budaya ditempatkan dalam *setting* modernisme.

---

<sup>18</sup> Karl D. Jackson, 1978, "Bureaucratic Polity : A Theoretical Framework for the Analysis of Power and Communications in Indonesia", dalam Karl D. Jackson and Lucian W. Pye (eds), 1978, *Political Power and Communications in Indonesia*, (Barkeley and Los Angeles : University of California Press), hlm. 3-22.

<sup>19</sup> Mohtar Mas' oed, *op.cit.*, hlm. 53-58.

Berdasarkan keempat alasan tersebut, tentunya dapat dilihat di manakah posisi NU di hadapan pemerintah Orde Baru. Basis sosial NU lebih berada pada petani pedesaan, nelayan kecil, pedagang kecil-menengah di perkotaan.<sup>20</sup> Dalam arus pembangunan yang lebih dikuasai oleh koalisi tekno-struktur yang begitu kuat itu, menempatkan basis sosial NU pada posisi marginal.<sup>21</sup> Dalam posisi yang demikian ini tentu saja secara luas, menurut basis sosialnya, NU berada dalam posisi termarginalisasi secara politik. NU berada jauh di luar lingkaran pembuat keputusan politik dalam pemerintah Orde Baru.

Demikian pula NU yang masih kental dengan otoritas tradisionalnya yang dipegang kalangan ulama --hal mana yang membedakannya dengan organisasi Islam lainnya-- menjadikan ia berada di luar pusaran arus modernisme. Keputusan politik NU yang cenderung berdasar pada pemikiran Islam tradisional-klasik,<sup>22</sup> tentu saja berada jauh di luar jangkauan pengambilan keputusan politik tingkat negara yang bersandar pada paradigma modernisme.

---

<sup>20</sup> Bruinessen, *op.cit.*, hlm. 150-180, bab "Akar Sosial NU : Pesantren dan Tarekat". Juga Bruinessen, 1994, "Konjungtur Sosial Politik di Jagad NU Paska Khittah 26 : Pergulatan NU Dekade 90-an", dalam Darwis (ed.), *op.cit.*, hlm. 61-86.

<sup>21</sup> M.M. Billah, 1994, "Elit-Ideologis dan Kelompok Kepentingan di Masyarakat Indonesia Mutakhir (Sekilas Gambaran Perubahan Sosio-Ekonomi-Politik Dalam Konteks Negara dan Masyarakat Sipil)", makalah untuk Sarasehan Generasi Muda Nahdlatul Ulama V, di Pondok Pesantren Arjo Winangun Cirebon, 10-12 Juni 1994.

<sup>22</sup> M. Ali Haidar, 1994, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia : Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), hlm. 38-136.



Walaupun di tubuh NU terdapat figur semacam Abdurrahman Wahid yang dinilai sebagai “*liberal-progressive*” dan “*neo-modernis*”,<sup>23</sup> namun pemikiran-pemikirannya tidak otomatis tampil sebagai representasi NU secara organisatoris. Mengingat dalam banyak kasus, pemikiran Abdurrahman Wahid di kalangan NU sendiri menimbulkan berbagai kontroversi. Hal ini dapat dijelaskan di antaranya karena bagi Abdurrahman Wahid, buah pemikirannya sudah melampaui cara berpikir kalangan ulama di tubuh NU yang dalam menunjukkan respon sikapnya selalu bersandar kepada *fiqh*.<sup>24</sup>

Berdasarkan pada kondisi struktural dan kultural yang semacam ini, tentu dapat menimbulkan pertanyaan lebih jauh : bagaimanakah sesungguhnya pola hubungan politik kalangan Nahdlatul Ulama dengan pemerintah Orde Baru ? Apakah NU berada dalam arus akomodasi pemerintah yang begitu diyakini sebagian kalangan ? Apakah tidak lebih tepat melihat NU dalam posisi marginal secara politik di hadapan pemerintah Orde Baru ? Penulisan disertasi ini akan melihat NU dalam posisinya yang cenderung marginal secara politik tersebut.

### C. Tujuan Penulisan

---

<sup>23</sup> Lihat : Gregory James Barton, 1995, *The Emergence of Neo-Modernism; a Progressive, Liberal, Movement of Islamic Thought in Indonesia : A Textual Study Examining the writings of Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib and Abdurrahman Wahid 1968-1980*, Ph.D. Dissertation, Department of Asian Language and Studies Monash University, hlm. 265-348

<sup>24</sup> Kacung Marijan, 1991, “Respon NU Terhadap Pembangunan Politik Orde Baru”, *Jurnal Ilmu Politik*, No. 9, hlm. 41-55.

1. Studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pola hubungan kalangan Nahdlatul Ulama dengan pemerintah Orde Baru. Penggambaran pola hubungan tersebut akan diarahkan kepada pola marginalisasi politik kalangan NU dalam pemerintahan Orde Baru.
2. Telaah ini bertujuan untuk mengungkapkan aspek pemikiran dan tindakan NU yang menandai pola hubungan NU dengan pemerintah Orde Baru.

#### **D. Manfaat Penulisan**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pola hubungan politik antara NU dengan pemerintah Orde Baru. Dengan demikian, secara akademik penulisan ini akan bermanfaat untuk memperkaya khazanah studi tentang NU, terutama untuk periode Orde Baru.

#### **E. Signifikansi Penulisan**

1. Studi tentang hubungan Islam dan politik merupakan bahan kajian yang menarik dan tak habis-habisnya untuk dikaji, dan telah memunculkan pula kajian mengenai hubungan Islam dan pemerintah Orde Baru. Penulisan ini akan berada dalam ranah yang sama yaitu menggambarkan pola hubungan Islam dan pemerintah. Kalau pada kajian Islam dan pemerintah menunjukkan kecenderungan hubungan yang akomodatif, maka penulisan yang lebih menekankan pada marginalisasi politik kalangan Nahdlatul Ulama ini masih relevan untuk dilakukan.



2. Pada kurun waktu belakangan, terlihat bahwa kajian mengenai NU begitu banyak bermunculan. Namun dari sekian banyak kajian tersebut belum menunjukkan adanya kajian yang khusus membahas tentang hubungan NU dan pemerintah Orde Baru, terutama respon sikap dan pemikiran kalangan NU terhadap modernisme yang dilancarkan negara Orde Baru. Oleh karena itu, studi tentang respon kalangan NU terhadap modernisme negara, maupun respon modernisme negara terhadap kalangan NU masih mungkin untuk dikembangkan.

#### F. Kajian Pustaka

Pada lebih dari satu dasawarsa belakangan ini, kekhawatiran Benedict Anderson sehubungan dengan langkanya kajian akademik tentang Nahdlatul Ulama agaknya tidak lagi beralasan.<sup>25</sup> Setidaknya semenjak NU mengambil sikap “Kembali ke Khittah 1926”, serangkaian kajian terhadap NU banyak dilakukan. Kajian tersebut berada pada berbagai tingkatan, mulai dari artikel yang terbit di media massa, artikel ilmiah di jurnal-jurnal akademik, maupun kajian akademik mulai dari skripsi sarjana sampai tingkat tesis master dan disertasi doktor sudah banyak dilakukan.

Studi tentang tumbuh dan berkembangnya NU diawali oleh Chairul Anam.<sup>26</sup> Dapat dikatakan studi Anam ini merupakan “langkah memecah kesunyian” pada

---

<sup>25</sup> Benedict R. O’G. Anderson, 1977, “Religion and Politics in Indonesia Since Independence”, dalam Benedict R. O’G. Anderson, Mitsuo Nakamura and M. Slamet (eds.), 1977, *Religion and Social Ethos in Indonesia*, (Clayton : Centre of Southeast Asian Studies Monash University).

<sup>26</sup> Choirul Anam, 1985, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Solo : Jatayu Sala).

ranah akademik dalam mengkaji NU. Hampir semua studi tentang NU selalu merujuk pada karya Anam ini.

Tulisan mengenai NU sebagai organisasi sosial keagamaan pada kurun awal terbentuknya NU dilakukan Musthofa Sonhadji dalam bentuk tesis untuk derajat master.<sup>27</sup> Sementara kajian NU pada periode Demokrasi Parlementer dilakukan oleh Greg Fealy.<sup>28</sup>

Barangkali yang cukup banyak dikaji adalah sikap NU untuk menarik diri dari dunia politik kepartaian semenjak Mukhtamar Situbondo tahun 1984.<sup>29</sup> Demikian pula studi dengan tema seputar sikap NU untuk menerima Pancasila sebagai asas organisasi juga menempati posisi yang penting.<sup>30</sup>

Masih dalam tema tentang Pancasila, Douglas E. Ramage mengkaji pemikiran Abdurrahman Wahid tentang penerimaan Pancasila oleh NU.<sup>31</sup> Kajian Ramage ini dikaitkan dengan penggunaan Pancasila oleh NU sebagai kritik terhadap jalannya kekuasaan rezim Soeharto. Studi Ramage ini didasarkan pada interpretasi terhadap "Rapat Akbar NU tahun 1992" yang sarat dengan kontroversi itu. Rapat Akbar NU

<sup>27</sup> Musthofa Sonhadji, 1988, *Nahdlatul Ulama Gerakan Sosial Keagamaan 1926-1952 Suatu Tinjauan Historis Kultural*, tesis M.A., Fakultas Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>28</sup> Greg Fealy, 1994, "Rowing in a Typhoon": Nahdlatul Ulama and The Decline of Parliamentary Democracy", dalam David Bourchier and John Legge (eds.), 1994, *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*, (Clayton: Centre of Southeast Asian Studies Monash University), hlm. 88-98.

<sup>29</sup> Satu di antaranya: Abdul Gaffar Karim, 1995, *Metamorfosis: NU dan Politisasi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: LKIS).

<sup>30</sup> Einar Martahan Sitompul, 1989, *NU dan Pancasila: Sejarah dan Peranan NU dalam Perjuangan Umat Islam Dalam Rangka Penerimaan Pancasila Sebagai Satu-Satunya Asas*, (Jakarta: Sinar Harapan).

<sup>31</sup> Douglas E. Ramage, 1995, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*, (London and New York: Routledge), terutama bab "Abdurrahman Wahid and Nahdlatul Ulama", hlm. 45-74.

ini dinilai Ramage begitu kontroversial, karena di tengah-tengah suasana menjelang pemilu di mana banyak pihak menggalang kekuatan untuk menyatakan dukungan “kebulatan tekad” untuk mencalonkan kembali Soeharto sebagai presiden, namun NU tidak melakukan hal itu. NU melalui Rapat Akbar justru meneguhkan kembali kesetiannya kepada Pancasila dan UUD 1945, dan ini dinilai Ramage sebagai kritik terhadap pemerintahan Soeharto.

Berkembangnya pendekatan “*state vis a vis civil society*” dalam ilmu politik, juga digunakan untuk melihat NU. Perspektif ini digunakan untuk menjelaskan posisi strategis NU ketika meninggalkan gelanggang politik kepartaian dan berpaling kembali menjadi organisasi sosial keagamaan.<sup>32</sup> Pengambilan posisi NU seperti ini, oleh sementara kalangan diyakini sebagai pilihan sadar untuk memberdayakan kemampuan politik masyarakat. Dengan kata lain, peranan NU untuk memberdayakan *civil society*, menurut kacamata perspektif ini cukup menjanjikan.

Masih dalam rangkaian bangkitnya studi-studi tentang NU, Fajrul Falaakh, salah seorang intelektual muda dan sekaligus pengurus Tanfidziyah PBNU, melakukan kajian NU menurut skala waktu.<sup>33</sup> Dalam perspektif historis-diakronis,

---

<sup>32</sup> Ellyasa K.H. Darwis (ed.), 1994, *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta : LKIS). Juga : Muhammad A.S. Hikam, 1994, “Khittah dan Penguatan Civil Society di Indonesia : Sebuah Kajian Historis Struktural Atas NU Sejak 1984”, Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PEP-LIPI), Jakarta.

<sup>33</sup> M. Fajrul Falaakh, 1994, “Jam’iyah Nahdlatul Ulama : Kini, Lampau dan Datang”, dalam Ellyasa K.H. Darwis (ed.), *ibid.*, hlm. 165-194.

Falaakh coba memotret NU semenjak kelahirannya, hingga prospek masa depannya. Menurut Falaakh, tak mengherankan bila NU piawai bukan saja dalam pemberdayaan masyarakat, namun sekaligus di dunia politik. Hal ini terlihat misalnya NU yang pada awalnya sebagai organisasi sosial keagamaan dan kemudian pada kurun belakangan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan, setelah sekian waktu melibatkan diri dalam dunia politik partisan, tentu saja menemukan akar-akar kesejarahannya dan ini tidak mengherankan. Demikian pula pengalaman NU dalam dunia politik, sebenarnya telah dirintis sejak awal dan semakin menguat pada tahun 1952 sejak ia keluar dari Masyumi untuk menjadi partai politik mandiri. Pengalaman NU di dunia politik kepertaian ini baru diakhiri pada awal dasawarsa 1980-an, tepatnya sejak 1984 dan itu tidak berarti bahwa sayap-sayap politik NU di tubuh partai politik patah sama sekali.

Studi yang agak lain coraknya barangkali adalah studi Martin van Bruinessen.<sup>34</sup> Martin yang cukup akrab dengan dunia pesantren itu memotret NU dari kacamata antropologis. Dalam perspektif ini, ia berusaha mengkaji tradisi yang hidup di tubuh NU, relasi-relasi kuasa yang melingkupi tubuh NU dan pencarian wacana-wacana baru yang gencar dilakukan oleh kalangan NU.

---

<sup>34</sup> Martin van Bruinessen, 1994, *NU : Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*, (Yogyakarta : LKIS).

Demikian pula disertasi M. Ali Haidar cenderung menjadi studi yang spesifik.<sup>35</sup> Haidar melihat NU dari kacamata internal NU sendiri. NU dikenal begitu kental dengan pendekatan *fiqh* dalam mengambil keputusannya. Pendekatan *fiqh* dalam NU semacam itu, digunakan Haidar untuk menjelaskan tingkah laku politik NU.

Studi yang agak mutakhir, memuat isu-isu kontemporer dan mengklaim dirinya sebagai buku pertama tentang NU dalam bahasa Inggris adalah buku yang dieditori oleh Greg Barton dan Greg Fealy, dan diterbitkan oleh lembaga yang cukup dihormati dalam kajian Indonesia, yaitu Monash Asia Institute pada Monash University.<sup>36</sup> Dalam buku itu terdapat sekumpulan tulisan tentang NU yang dilakukan secara intens oleh kalangan pengamat asing.

Kalau buku itu dipilah berdasar tema yang dikaji akan diperoleh gambaran sebagai berikut. *Pertama*, tema seputar dinamika internal NU yang ditunjukkan dalam panggung Muktamar. Pada tema ini dilakukan oleh Mitsuo Nakamura, Martin van Bruinessen dan Greg Fealy.<sup>37</sup> Nakamura menulis tentang sikap radikal-tradisional

<sup>35</sup> M. Ali Haidar, 1994, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia : Pendekatan Fikih Dalam Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama).

<sup>36</sup> Greg Barton and Greg Fealy (eds.), 1996, *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia*, (Clayton : Monash Asia Institute Monash University).

<sup>37</sup> Dua tulisan Nakamura itu berjudul : "The Radical Traditionalism of Nahdlatul Ulama in Indonesia : A Personal Account of The 26th National Congress, June 1979, Semarang", dan "NU's Leadership Crisis and Search for Identity in The Early 1980s : From The 1979 Semarang Congress to The 1984 Situbondo Congress", dalam Barton and Fealy (eds.), *ibid.*, hlm. 68-109. Sementara dua tulisan Martin van Bruinessen berjudul : "The 28th Congress of The Nahdlatul Ulama : Power Struggle and The Social Concerns", dan "Traditions for Future : The Reconstruction of Traditionalist Discourse Within NU", dalam Barton and Fealy (eds.), *ibid.*, hlm. 139-189. Tulisan Greg Fealy tentang Muktamar Cipasung berjudul : "The 1994 NU Congress and Aftermath : Abdurrahman Wahid, Suksesi and the Battle for Control of NU", dalam Barton and Fealy (eds.), *ibid.*, hlm. 257-277.

NU yang ditunjukkan pada Mukhtamar NU 1979 di Semarang. Demikian pula ia menulis tentang krisis kepemimpinan dan pencarian identitas NU pada Mukhtamar NU Situbondo tahun 1984. Sementara itu perhatian NU dalam permasalahan sosial kemasyarakatan dalam Mukhtamar NU 1989 di Yogyakarta dikaji oleh Martin van Bruinessen. Selain itu Martin juga mengkaji tentang rekonstruksi diskursus tradisional yang terjadi dalam tubuh NU. Greg Fealy mengkhususkan diri mengkaji Mukhtamar NU di Cipasung tahun 1994 yang sarat dengan upaya campur tangan politik dari pihak eksternal NU dalam mempengaruhi jalannya muktamar

*Kedua*, studi tentang pemikiran yang berkembang dalam tubuh NU.<sup>38</sup> Greg Fealy menulis tentang tingkah laku dan pemikiran K.H. Wahab Chasbullah dalam perspektif tradisionalisme dan dalam kerangka perkembangan NU. Sementara itu sikap “*tawassuth*” NU dalam mengambil Pancasila sebagai asas organisasi terungkap dalam pemikiran K.H. Achmad Siddiq. Pemikiran Kyai Achmad Siddiq ini ditulis oleh Greg Barton.

Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang demokratisasi, toleransi agama dan Pancasila direkam dalam tulisan Douglas E. Ramage.<sup>39</sup> Demikian pula pemikiran

<sup>38</sup> Tentang Kyai Wahab Chasbullah : Greg Fealy, “Wahab Chasbullah, Traditionalism and The Political Development of Nahdlatul Ulama”, dalam Barton and Fealy (eds.), *ibid.*, hlm. 1-41. Pemikiran Kyai Achmad Siddiq terekam dalam Greg Barton, “Islam, Pancasila and The Middle Path of Tawassuth : The Thought of Achmad Siddiq”, dalam Barton and Fealy (eds.), *ibid.*, hlm. 110-138.

<sup>39</sup> Pemikiran Gus Dur terekam dalam tulisan : Douglas E. Ramage, “Democratisation, Religious Tolerance and Pancasila : The Political Thought of Abdurrahman Wahid”, dalam Barton and Fealy (eds.), *ibid.*, hlm. 227-256; dan Greg Barton, “The Liberal, Progressive Roots of Abdurrahman Wahid’s Thought”, dalam Barton and Fealy (eds.), *ibid.*, hlm. 190-226.



Gus Dur (nama akrab Abdurrahman Wahid) yang cenderung kontroversial dan liberal itu coba dilacak akar-akarnya oleh Greg Barton.

*Ketiga*, studi mengenai dinamika eksternal NU. Dalam hal ini Andree Feillard mengkaji hubungan yang tidak mengesankan antara kalangan Islam tradisional, dalam hal ini NU, dengan kubu militer pada masa Orde Baru.<sup>40</sup>

Berdasarkan berbagai kajian tentang NU tersebut, studi ini hendak menelaah NU, terutama pola hubungan politik antara NU dengan pemerintah Orde Baru. Studi tentang hubungan Islam dan Orde Baru acapkali menunjukkan adanya variasi pola hubungan, yaitu antagonistik (oposisi), resiprokal-kritis dan akomodatif. Bahkan pada era akhir 1980-an dan awal 1990-an, banyak studi yang meyakini adanya akomodasi pemerintah Orde Baru terhadap kalangan Islam. Studi ini hendak menawarkan cara pandang lain tentang pola hubungan antara Islam –dalam hal ini NU-- dan pemerintah Orde Baru, yaitu dengan cara pandang pola hubungan marginalisasi politik.

### **G. Kerangka Teoritik**

Sejumlah studi tentang pemerintah Orde Baru menunjukkan kecenderungan adanya karakter otoriter-birokratik-korporatis-developmental. Studi yang dilakukan

---

<sup>40</sup> Andree Feillard, "Traditionalist Islam and the Army in Indonesia's New Order : The Awkward Relationship", dalam Barton and Fealy (eds.), *ibid.*, hlm. 42-67.



Karl D. Jackson dengan konsep *bureaucratic polity*,<sup>41</sup> menjelaskan bahwa karakter pemerintah Orde Baru ditandai oleh adanya pengambilan keputusan yang hanya terjadi sebatas di lingkaran elit pemerintahan, termasuk di dalamnya para birokrat sipil dan militer, dengan dukungan para tenaga ahli yaitu kalangan teknokrat.

Pada model kepolitikan semacam ini, pemerintahan Orde Baru menempatkan partisipasi dan mobilisasi masyarakat hanya sebatas pada pelaksanaan kebijakan politik. Sementara pada tingkat *agenda setting* dan *policy formulations* masih berada di lingkaran elit pemerintahan. Walaupun pada model kepolitikan ini partai politik masih tetap ada, namun aktifitasnya tidak efektif dalam membangun partisipasi dan mobilisasi masyarakat. Pengambilan kebijakan politik pada pemerintahan Orde Baru cenderung terisolasi dari keterlibatan aktif dari partisipasi masyarakat, dan cenderung otonom terhadap tuntutan masyarakat.

Dwight Y. King dengan konsep *bureaucratic authoritarian-regime*,<sup>42</sup> menjelaskan kepolitikan pemerintahan Orde Baru memiliki empat ciri utama. *Pertama*, secara relatif pemerintahan Orde Baru menggunakan pola dominasi terhadap kondisi sosial-politik, dan memiliki struktur serta kapasitas untuk

<sup>41</sup> Karl D. Jackson, 1978, "Bureaucratic Polity : A Theoretical Framework for the Analysis of Power and Communications in Indonesia", dalam Karl D. Jackson and Lucian W. Pye (eds), 1978, *Political Power and Communications in Indonesia*, (Barkeley and Los Angeles : University of California Press), hlm. 3-22.

<sup>42</sup> Dwight Y. King, 1982, "Indonesia's New Order as a Bureaucratic Polity, a Neopatrimonial Regime or a Bureaucratic Authoritarian Regime : What Difference Does It Make ?", dalam Benedict Anderson and Audrey Kahin (eds.), 1982, *Interpreting Indonesian Politics : Thirteen Contributions to The Debate*, (Ithaca : Cornell Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Cornell University), hlm. 104-116.

mengontrol sejumlah potensi tekanan yang mungkin muncul untuk mendestabilisasi selama proses modernisasi.

*Kedua*, pada pemerintahan Orde Baru, otoritas utama rezim berada pada oligarki atau militer sebagai lembaga. Ketika kelompok militer sebagai lembaga memegang kekuasaan, mereka mengadopsi pendekatan birokratik dan teknokratik dalam pembuatan kebijakan.

*Ketiga*, pemerintahan Orde Baru memiliki karakter adanya suatu kehendak untuk bekerja dalam suatu kerangka rezim yang apatis untuk menerima basis masyarakat. Karakter ini diaplikasikan dalam bentuk kebijakan depolitisasi massa dan *floating mass*.

*Keempat*, pemerintah Orde Baru cenderung berupaya membatasi pluralisme, dengan menggunakan represi, kooptasi, dan secara tipikal membentuk jaringan organisasi korporatis, dan mengontrol secara ketat kelompok oposisi. Pada karakter ini dimaksudkan untuk membentuk suatu pola relasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pola korporatis.

Studi yang dilakukan Mohtar Mas' oed menunjukkan adanya perpaduan antara karakter otoriter-birokratik-korporatis pada pemerintahan Orde Baru.<sup>43</sup> Menurut Mohtar Mas' oed, pemerintahan otoriter-birokratik Orde Baru memiliki sejumlah karakter sebagai berikut : (1) pemerintah dipegang oleh militer sebagai suatu lembaga

---

<sup>43</sup> Mohtar Mas' oed, 1989, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta : LP3ES), hlm. 1-27..

yang berkolaborasi dengan teknokrat sipil; (2) pemerintah didukung oleh pengusaha oligopolistik yang berkolaborasi dengan masyarakat bisnis internasional; (3) pengambilan keputusan dalam rezim bersifat birokratik-teknokratik, sebagai lawan dari pendekatan politik yang memerlukan suatu *bargaining* di antara berbagai kelompok kepentingan; (4) massa didemobilisasikan; (5) pemerintah melakukan tindakan-tindakan represif untuk mengendalikan oposisi.

Dalam mengelola hubungan antara pemerintah Orde Baru dengan masyarakat dilakukan strategi korporatisme.<sup>44</sup> Korporatisme ini adalah suatu sistem perwakilan kepentingan di mana unit-unit yang membentuknya diatur oleh pemerintah dalam organisasi-organisasi yang jumlahnya dibatasi dan bersifat tunggal, mewajibkan (keanggotaan), tidak saling bersaing, diatur secara hirarkis dan dibedakan secara fungsional. Dalam sistem korporatisme ini pengakuan dan pemberian izin terhadap eksistensi organisasi diberikan oleh pemerintah, dan organisasi diberi hak monopoli untuk mewakili kepentingan dalam bidang masing-masing sebagai imbalan atas kesediaan mematuhi pengendalian-pengendalian tertentu dalam pemilihan pemimpin mereka dan dalam artikulasi tuntutan dan dukungan mereka, dengan tujuan untuk menindas konflik kepentingan serta menciptakan keselarasan, kesetiakawanan dan kerja sama dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Karakter otoriter-birokratik-korporatis yang melekat pada pemerintahan Orde Baru merupakan konsekuensi dari pilihan politik strategis untuk menjalankan

---

<sup>44</sup> Mohtar Mas' oed, *ibid.*, hlm. 13.

pembangunan. Dalam kerangka untuk melancarkan jalannya pembangunan yang kapitalistik, perpaduan antara strategi politik otoriter-birokratik-korporatis dipilih oleh pemerintah Orde Baru untuk mengendalikan masyarakat dan mencegah partisipasi politik populis yang dikhawatirkan dapat mengganggu jalannya pembangunan tersebut.

Pemerintah Orde Baru dalam melakukan strategi korporatisme ini ditempuh dengan dua cara.<sup>45</sup> *Pertama*, bagi kelompok kepentingan dalam masyarakat yang cenderung menguntungkan pemerintah, maka korporatisasi ini digunakan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah. Pada titik ini pemerintah akan melakukan akomodasi politik terhadap kelompok masyarakat tersebut, dan sebagai imbalannya, kepada para pemimpin kelompok masyarakat ini akan diberi imbalan material dan politik tertentu. Pada gilirannya pemerintah akan menggandeng dan melibatkan (*associating and incorporating*) kelompok masyarakat tersebut ke dalam proses politik, atau dengan kata lain pemerintah akan melakukan *political inclusion*.

*Kedua*, bagi kelompok masyarakat yang dinilai akan mengancam stabilitas politik, maka korporatisasi ini digunakan pemerintah Orde Baru untuk “menjinakkannya”. Apabila dalam cara korporatisasi berupa “penjinakkan politik” ini dianggap kurang efektif, maka pemerintah Orde Baru akan melanjutkan dengan menempuh cara penyingkiran politik. (*political exclusion*), dan bahkan represi politik.

---

<sup>45</sup> Mohtar Mas' oed, *ibid.*, hlm. 14-15.

Kerangka teoritik otoriter-birokratik-korporatis selanjutnya akan digunakan dalam penulisan disertasi ini untuk menjelaskan hubungan politik antara Nahdlatul Ulama dan pemerintah Orde Baru. Kerangka teoritik tersebut diharapkan dapat menjelaskan apakah hubungan politik antara pemerintah Orde Baru dengan NU lebih diwarnai oleh corak akomodasi politik atau justru penyingkiran politik.

#### **H. Metode Penulisan**

Penulisan ini bersandar kepada data historis. Oleh karena itu penulisan ini akan menggunakan pendekatan historis, melalui serangkaian wawancara dengan sejumlah tokoh dan aktifis NU, dan studi-studi terhadap dokumen-dokumen sejarah dan studi mutakhir yang relevan dengan tema NU dan pemerintahan Orde Baru. Dokumen-dokumen itu dapat bersifat primer bila berbentuk, seperti hasil-hasil Keputusan Muktamar, Munas Alim Ulama NU dan rapat-rapat yang dilakukan NU. Dokumen itu dapat pula bersifat sekunder bila berupa hasil penelitian tentang NU, baik dalam bentuk buku, tulisan dalam jurnal ilmiah, maupun makalah-makalah yang pernah ditulis mengenai topik yang relevan dengan penulisan ini. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis menggunakan analisis historis untuk menemukan prinsip-prinsip umum, yang dimungkinkan munculnya teori baru mengenai hubungan NU dan pemerintah Orde Baru.

## I. Sistematika Penulisan

Disertasi ini terdiri dari lima bab. Bab I akan memaparkan permasalahan yang menjadi latar belakang penulisan, tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari penulisan disertasi ini. Pada bagian ini juga akan dipaparkan sejumlah studi yang mendahului studi ini, kerangka teori yang digunakan dalam disertasi ini, dan metodologi yang digunakan dalam penulisan disertasi.

Bab II akan menguraikan akar-akar historis NU. Pada bagian ini akan dibahas latar belakang historis yang menjadi faktor berdirinya NU, basis sosial NU dan hubungan antara NU dan *ahlussunnah wal jama'ah*. Masih dalam bab ini, juga akan dideskripsikan akar-akar historis keterlibatan NU dalam dunia politik.

Bab III secara khusus akan membahas kepolitikan Orde Baru. Pembahasan akan dimulai dengan menguraikan relasi politik antara NU dengan pemerintahan Demokrasi Terpimpin, dan dilanjutkan dengan tinjauan tentang jatuhnya rezim Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno. Pada bab ini, bagaimana keterlibatan militer dalam panggung politik Orde Baru juga akan dibahas. Pada bagian ini juga akan dibahas politik yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru, seperti politik yang berorientasi kepada pembangunan ekonomi, stabilisasi kehidupan politik, dan ideologisasi. Pembahasan pada bab ini juga akan meliputi ideologi pembangunanisme yang dianut oleh Orde Baru sebagai paradigma utama dalam berpolitik. Bab ini akan diakhiri dengan upaya untuk merekonstruksi model kepolitikan Orde Baru.

Bab IV merupakan bagian utama dari disertasi ini. Pada bab ini akan dibahas keterlibatan politik NU pada era Orde Baru. Berbagai perkembangan, terutama hubungan NU dengan pemerintah Orde Baru, yang pada akhirnya membawa kepada suatu pola marginalisasi politik pemerintah Orde Baru terhadap NU, akan menjadi pokok bahasan pada bab ini.

Bab V merupakan penutup dari penulisan disertasi ini. Pada bab ini akan coba diuraikan secara singkat uraian terdahulu, dan kemudian akan ditarik suatu kesimpulan sebagai bahan temuan dalam disertasi ini.





## BAB V

### KESIMPULAN

Perjalanan historis NU yang begitu panjang melintasi batas waktu berbagai era kekuasaan diwarnai pasang surut. Pada awalnya NU lahir sebagai sebuah organisasi sosial keagamaan (*jam'iyah diniyyah*). Tujuan utama berdirinya NU adalah tetap dapat dilaksanakannya praktek keagamaan Islam berdasarkan *ahlussunnah wal jama'ah*. Berbagai kegiatan NU semuanya diorientasikan dalam rangka mengamalkan ajaran Islam menurut *ahlussunnah wal jama'ah*.

NU terlibat dalam dunia politik ketika berbagai organisasi Islam --termasuk NU di dalamnya-- pada awal kemerdekaan Indonesia mendeklarasikan berdirinya Partai Islam Masyumi. Pergolakan antar faksi di tubuh Masyumi, terutama antara kalangan intelektual modernis dengan kalangan NU, memicu ketegangan antar kelompok Islam sebagaimana pernah terjadi pada saat dilaksanakannya Kongres-Kongres Islam sebelum berdirinya NU. Perselisihan pandangan dan pembagian jabatan yang tidak proporsional dirasakan NU ketika ia masih bergabung dalam Masyumi.

Serangan kalangan Islam modernis di Masyumi kepada kalangan NU semakin tidak dapat dikendalikan lagi. Hal inilah yang memacu NU mengambil sikap tegas menyatakan keluar dari Masyumi, dan selanjutnya mendeklarasikan berdiri sebagai partai politik mandiri pada tahun 1952. Eksistensi NU cukup diakui, dan ini terlihat

pada hasil Pemilu 1955, yang menempatkan posisi NU berada pada peringkat ketiga setelah PNI, Masyumi, dan satu tingkat di atas PKI.

Perolehan suara yang cukup memadai pada pemilu 1955, membawa NU terlibat dalam pemerintahan di bawah Kabinet Ali-Roem-Idham. Ketegangan internal antar partai di pemerintahan dan parlemen, menyebabkan perdebatan di konstituante tak kunjung usai. Keresahan kalangan militer terhadap intervensi pemerintah sipil berbasis partai ke dalam urusan intern militer, ketidaksenangan terhadap politik kepartaian dan sidang konstituante yang tidak selesai-selesai, menyebabkan militer mendesak Soekarno untuk membubarkan konstituante, dan menyatakan kembali berlakunya UUD 1945. Begitu Dekrit Presiden 5 Juli 1959 keluar, maka sejak itulah era Demokrasi Terpimpin dimulai, dan menandai berakhirnya Demokrasi Liberal.

Pada era Demokrasi Terpimpin, tinggal ada tiga kekuatan politik yang dominan, yaitu Soekarno, militer dan PKI. PKI yang pada era sebelumnya tidak dilibatkan dalam pemerintahan koalisi Ali-Roem-Idham, pada era Demokrasi Terpimpin mendapatkan kesempatan leluasa di bawah perlindungan Soekarno. Demikian pula NU dihadapkan pada kondisi yang sulit dalam menyikapi Demokrasi Terpimpin ini. Dengan alasan untuk menghindari eliminasi politik sebagaimana dialami oleh partai Islam lainnya, Masyumi, maka NU terpaksa terlibat dalam pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan DPR Gotong Royong.

Terlihat bahwa pada dua era, yaitu era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, secara organisatoris NU terlibat di dalamnya. Yang membedakannya

adalah, pada saat era Demokrasi Liberal NU tampil ke panggung politik atas hasil pemilu 1955, sementara pada era Demokrasi Terpimpin lebih karena patronase Soekarno.

Selepas pecahnya tragedi berdarah pada peristiwa 30 September 1965, NU kembali dihadapkan pada kondisi yang sulit. Di satu pihak para elit NU harus tetap menjaga loyalitas terhadap Soekarno, di pihak lain NU harus responsif terhadap perkembangan. Akhirnya NU berada pada pihak militer dan meninggalkan Soekarno.

Pengalaman NU dalam kehidupan politik masih berlanjut hingga era Orde Baru. Sejak awal berdirinya Orde Baru, hubungan antara NU dengan pemerintah Orde Baru mulai menunjukkan ketegangan-ketegangan. NU masih tampil sebagai partai politik yang independen pada pemilu 1971. Bahkan pada pemilu ini, NU berhasil menduduki posisi kedua setelah Golkar (partai pemerintah sebagai sayap sipil dari politik militer). Sejak tahun 1973, NU masuk dalam politik penyederhanaan partai (fusi), dan bergabung dengan beberapa partai politik Islam lainnya dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal ini menunjukkan bahwa NU masih tetap berkiprah dalam dunia politik, walaupun tidak semata-mata atas nama NU lagi, namun sudah terlebur dalam PPP.

Ketegangan-ketegangan politik, yang pada gilirannya membawa kepada kerenggangan hubungan antara kelompok Islam politik dengan pemerintah Orde Baru muncul berkaitan dengan berbagai isu yang muncul ke permukaan. Isu-isu tersebut di antaranya adalah keinginan Piagam Jakarta mendapatkan pengakuan resmi dari

pemerintah, isu yang berkaitan dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan, isu diakuinya secara resmi aliran kepercayaan dalam GBHN, dan isu seputar asas tunggal Pancasila.

Keretakan ini semakin mendorong NU untuk bersikap oposisional, karena berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru dinilai tidak sesuai lagi dengan cita-cita awal Orde Baru, dan mulai menunjukkan tanda-tanda merugikan kepentingan politik NU. Penataan partai semakin membuat NU kehilangan peranan politiknya. Konflik internal di tubuh PPP menyusul politik penataan partai yang dilakukan pemerintah Orde Baru, membuat NU semakin terpinggirkan dalam arena politik.

Peminggiran politik merupakan salah satu strategi dari pemerintah Orde Baru yang memiliki karakter politik otoriter-birokratik-developmental-korporatis. Pemerintah Orde Baru yang merupakan kolaborasi antara militer, teknokrat sipil dan pemodal besar, memiliki beberapa ciri utama : (1) elit pemerintahan berada pada oligarki militer sebagai lembaga, didukung oleh teknokrat sipil, dan kalangan bisnis, (2) dalam pengambilan keputusan politik cenderung terisolasi hanya sebatas pada lingkaran elit pemerintah dan otonom dari partisipasi politik masyarakat, (3) proses pengambilan keputusan cenderung birokratik dan mengabaikan proses tawar-menawar dengan berbagai kelompok masyarakat yang berkepentingan, (4) sebagai konsekuensi dari beberapa karakter tersebut adalah demobilisasi massa dan melakukan kontrol represif terhadap kelompok oposisi yang ada dalam masyarakat.

Karakter politik pemerintah Orde Baru yang demikian ini merupakan konsekuensi dari pilihan politik strategis terhadap pembangunan. Dalam kerangka untuk mengamankan suksesnya proses pembangunan ekonomi, maka penciptaan stabilitas politik merupakan sebuah keharusan yang ditempuh pemerintah Orde Baru.

Kekhawatiran terhadap munculnya ancaman gangguan yang dapat mendestabilisasikan pembangunan, maka pemerintah Orde Baru menjalankan strategi korporatisme. Korporatisme ini pada dasarnya adalah upaya pemerintah untuk mengelompokkan masyarakat ke dalam beberapa organisasi sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan upaya tersebut dalam rangka pengendalian politik pemerintah terhadap masyarakat.

Korporatisme pemerintah Orde Baru dijalankan dengan dua cara. *Pertama*, bagi kelompok masyarakat yang memberikan dukungan dan keuntungan bagi pemerintah, maka korporatisasi terhadap kelompok ini akan berupa akomodasi politik, atau masuk dalam kerangka *political inclusion*. *Kedua*, bagi kelompok masyarakat yang memiliki potensi mengancam stabilitas, maka korporatisasi pemerintah digunakan untuk “menjinakkannya”. Apabila upaya “penjinakkan” ini tidak efektif, maka pemerintah Orde Baru akan melanjutkannya dengan penyingkiran politik (*political exclusion*).

NU sebagai salah satu kekuatan politik Islam juga mengalami ketegangan hubungan dengan pihak pemerintah Orde Baru terutama pada era 1970-an hingga awal 1980-an. Pada titik ini NU berputar haluan, mengubah dirinya dari partai politik

di mana NU menjadi bagian dari PPP, berubah menjadi organisasi sosial keagamaan yang dikenal dengan sebutan kembali ke Khittah 1926. Pertimbangan yang digunakan NU untuk keluar dari arena politik formal ini terutama karena sistem politik yang dibangun pemerintah Orde Baru tidak memberikan kemungkinan partisipasi politik secara aktif, dan tidak memberikan kemungkinan masyarakat luas terlibat dalam pembentukan kebijakan publik. Oleh karena itu, kembali kepada organisasi sosial dan keluar dari kehidupan politik formal menjadi pilihan utama yang ditempuh NU.

Ketegangan antara pemerintah Orde Baru dengan kalangan gerakan Islam menunjukkan tanda-tanda mereda dan dilanjutkan dengan pola akomodasi politik, terutama sejak akhir era 1980-an dan awal 1990-an. Puncak dari akomodasi politik pemerintah Orde Baru itu ditandai dengan dibentuknya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Akomodasi politik ini tidak terjadi begitu saja, namun diawali oleh sejumlah fenomena lainnya yang berkaitan. Sejak awal era Orde Baru, di luar pergerakan partai politik Islam, sejumlah aktifis Islam terlibat aktif dalam gerakan di luar gerakan kepartaian. Gerakan Islam di luar jalur kepartaian ini pada umumnya dimotori oleh kalangan intelektual muslim. Menurut para aktifis kalangan ini, memperjuangkan Islam tidak semata-mata lewat jalur partai, dan dapat diperjuangkan lewat jalur lain. Bersamaan dengan munculnya kelas menengah muslim yang terdidik secara luas ini, dan redanya ketegangan antara pemerintah Orde Baru dengan kalangan gerakan Islam



pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, maka pada titik inilah terjadi akomodasi politik pemerintah Orde Baru terhadap kalangan Islam.

Sementara itu, sekalipun sudah meninggalkan dunia politik formal, NU masih tetap bersikap kritis terhadap pemerintah Orde Baru. NU --terutama pada saat di bawah kepemimpinan Gus Dur-- tampil dengan menggunakan wacana Pancasila sebagai kritik terhadap pemerintah Orde Baru. Berdasarkan hal ini, agaknya mendorong pemerintah Orde Baru untuk tetap melancarkan peminggiran NU dengan cara memisahkan Gus Dur dari kursi kepemimpinan NU.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan akomodasi politik pemerintah Orde Baru terhadap kalangan Islam tidak menyentuh semua kalangan gerakan Islam. NU sebagai bagian dari gerakan Islam pada era Orde Baru ini, baik ketika sebagai partai politik mandiri, atau pada saat tampil sebagai kekuatan politik dalam PPP, dan hingga keluar dari PPP dan kembali menjadi organisasi sosial keagamaan, lebih banyak dalam posisi marjinal dan tersingkir secara politik dalam hubungannya dengan pemerintah Orde Baru.

Pola hubungan marjinalisasi politik tersebut disebabkan oleh perbedaan karakter antara NU dengan pemerintah Orde Baru. Di satu pihak, NU adalah organisasi sosial keagamaan yang bercorak tradisional, berorientasi untuk memperjuangkan agar paham *ahlussunnah wal Jama'ah* tetap dapat dipraktekkan, berbasis masyarakat pedesaan, dan di bawah pola kepemimpinan klasmatik kyai. Corak hubungan yang demikian ini tentu memiliki potensi hubungan yang kuat antara

organisasi dengan basis sosial pendukungnya. Pada kehidupan politik, corak yang demikian ini memiliki potensi politik yang besar.

Perhatian NU yang beralih dari dunia politik kepartaian kepada masalah sosial-keagamaan, tidak membuat dirinya terhindar dari politik peminggiran pemerintah Orde Baru. Jalinan yang erat antara para elit NU dengan basis massa pendukungnya, tetap saja membuat pemerintah Orde Baru was-was. Walaupun NU sudah tidak lagi bermain pada level politik partisan, namun karena pengalaman NU dalam dunia politik formal, maka peranan politik NU masih cukup diperhitungkan oleh pemerintah Orde Baru. Dalam kondisi yang demikian ini, pemerintah Orde Baru senantiasa membangun strategi politik untuk tetap dapat mengendalikan NU. Pada tingkat tertentu, bila proses pengendalian politik dengan strategi akomodasi politik tidak efektif, maka pada kesempatan yang lain pemerintah Orde Baru akan menempuh strategi yang lebih keras yaitu peminggiran politik terhadap NU sebagai lembaga dan juga dilakukan penyingkiran politik terhadap tokoh-tokoh NU.

Di sisi lain, pemerintah Orde Baru lebih berorientasi kepada pembangunan ekonomi, dengan membangun aliansi strategis dengan kalangan pemodal asing yang kuat dan didukung oleh kalangan militer. Corak sistem politik yang demikian ini, pemerintah Orde Baru tidak menghendaki adanya organisasi yang mempunyai ikatan yang kuat dengan basis sosial pendukungnya. Dalam sistem politik yang seperti ini, tentu saja menjadikan NU sebagai salah satu sasaran utama untuk dilakukan politik pengendalian, tidak lain dengan tujuan agar potensi destruktif yang mungkin dimiliki

oleh NU tidak secara efektif muncul ke permukaan, sehingga tidak akan mengganggu proses pembangunan ekonomi. Dapat dikatakan bahwa peminggiran politik NU ini, tidak lain adalah agar tidak mengganggu aliansi strategis para pelaku pembangunan ekonomi era Orde Baru, yaitu para birokrat pemerintah, kalangan militer, dan pemilik modal. Oleh karena itu, dalam kerangka politik yang demikian inilah dapat dipahami bahwa hubungan politik pemerintah Orde Baru dengan kalangan Nahdlatul Ulama senantiasa ditandai dengan peminggiran politik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abbas, Siradjuddin, *I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyah), 1982.
- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat : Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta : LP3ES), 1987.
- \_\_\_\_\_ dan Surjomihardjo, Abdurahman (eds.), *Ilmu Sejarah dan Historiografi*, (Jakarta : Gramedia), 1983.
- Aceh, Aboebakar (ed.), *Sejarah Hidup K.H.A. Wachid Hasjim dan Karangan Tersiar*, (Jakarta : Panitia Buku Peringatan), 1957.
- Adnan, Abdul Basit, *Kemelut di NU Antara Kyai dan Politisi*, (Sala : Mayasari), 1982.
- Ahmad, Bakaruddin Rosyidi, *Pemikiran Marx Tentang Alienasi : Sejarah, Metode dan Isi*, Tesis S-2, Program Pascasarjana Ilmu Politik UGM Yogyakarta, 1991.
- Akarhanaf (Abdul Karim Hasjim-Nafidah), *Kjai Hasjim Asj'ari Bapak Umat Islam Indonesia 1871-1947*, (Jombang : t.p.), 1949.
- Alagappa, Muthiah (ed.), *Political Legitimacy in Southeast Asia : The Quest for Moral Authority*, (California : Stanford University Press), 1995.
- Alfian, *Sekitar Lahirnya "Nahdlatul Ulama" (NU)*, (Jakarta : Lembaga Ekonomi dan Masyarakat Nasional LIPI), 1969.
- \_\_\_\_\_, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, (Jakarta : Gramedia), 1978.
- Ali, Fachry dan Effendy, Bachtiar, *Merambah Jalan Baru Islam : Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, (Bandung : Mizan), 1986.
- Amal, Ichlasul, *Regional and Central Government in Indonesian Politics : West Sumatera and South Sulawesi 1949-1979*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press), 1992.

- Amelz, H.O.S Tjokroaminoto, *Hidup dan Perjuangannya*, (Jakarta : Bulan Bintang), 1950.
- Anam, Choirul, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, (Solo : Jatayu Sala), 1985.
- Anderson, Benedict R. O'G., Mitsuo Nakamura and M. Slamet (eds.), *Religion and Social Ethos in Indonesia*, (Clayton : Centre of Southeast Asian Studies Monash University), 1977.
- Anderson, Benedict and Audrey Kahin (eds.), *Interpreting Indonesian Politics : Thirteen Contributions to The Debate*, (Ithaca : Cornell Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Cornell University), 1982.
- Anwar, Rosihan, *Pergerakan Islam dan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta : PT. Kartikatama), 1971.
- Arndt, H.W. (ed.), *Pembangunan dan Pemerataan : Indonesia di Masa Orde Baru*, (Jakarta : LP3ES), 1983.
- Azhar, Ipong S., *Benarkah DPR Mandul : Pemilu, Partai dan DPR Masa Orde Baru*, (Yogyakarta : Bigraf Publishing), 1997.
- Azis, M. Imam (ed.), *Agama, Demokrasi dan Keadilan*, (Jakarta: Gramedia), 1993.
- Azra, Azyumardi dan Umam, Saiful (eds.), *Menteri-Menteri Agama RI : Biografi Sosial-Politik*, (Jakarta : INIS-PPIM Balitbang Depag), 1998.
- Barton, Gregory James, *The Emergence of Neo-Modernism; a Progressive, Liberal, Movement of Islamic Thought in Indonesia : A Textual Study Examining the writings of Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib and Abdurrahman Wahid 1968-1980*, Ph.D. Dissertation, Department of Asian Language and Studies Monash University, 1995.
- Barton, Greg and Fealy, Greg (eds.), *Nahdlatul Ulama, Traditional Islam and Modernity in Indonesia*, (Clayton : Monash Asia Institute), 1996.
- Bellamy, Richard, *Teori Sosial Modern : Perspektif Itali*, terj., (Jakarta : LP3ES), 1990.

- Benda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit : Islam di Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*, terj., (Jakarta : Pustaka Jaya), 1985.
- Bhakti, Ikrar Nusa et.al., *Tentara Mendamba Mitra : Hasil Penelitian LIP tentang Pasang Surut Keterlibatan Militer Dalam Kehidupan Kepestaian di Indonesia*, (Bandung : Mizan), 1999.
- Bolland, B.J., *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1972*, terj., (Jakarta : Grafiti Press), 1985.
- Bourchier, David, *Lineages of Organicist Political Thought in Indonesia*, Ph. D. Thesis, (Melbourne : Monash University), 1996.
- \_\_\_\_\_ and John Legge (eds.), *Democracy in Indonesia 1950s and 1990s*, (Clayton : Centre of Southeast Asian Studies Monash University), 1994.
- Bresnan, John, *Managing Indonesia : The Modern Political Economy*, (New York : Columbia University Press), 1993.
- Brochkelmann, Carl, *Tarikh al-Syu'ub al-Islamiyah*, alih bahasa Arab oleh Habib Amin Faris dan Murik al-Ba'albaqi, (Beirut : Dar al-Ilmi li al-Mabayin), 1968.
- Bruinessen, Martin van, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat : Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung : Mizan), 1995.
- \_\_\_\_\_, *NU : Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*, terj., (Yogyakarta : LKIS), 1994.
- Budiman, Arief (ed.), *State and Civil Society in Indonesia*, (Clayton : Centre of Southeast Asian Studies Monash University), 1992.
- \_\_\_\_\_, *Negara dan Pembangunan*, (Jakarta : Yayasan Padi dan Kapas), 1991.
- \_\_\_\_\_, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta : Gramedia), 1995.
- Cahyono, Heru, *Peranan Ulama dalam Golkar 1971-1980 : Dari Pemilu sampai Malari*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), 1992.
- \_\_\_\_\_, *Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), 1997.



- Chalid, Idham, *Mendayung Dalam Taufan*, (Jakarta : Api Islam), 1974.
- Chalmers, Ian and Hadiz, Vedi R. (eds.), *The Politics of Economics Development in Indonesia : Contending Perspectives*, (London : Routledge), 1997.
- Chilcote, Ronald H., *Theories of Comparative Politics : The Search for a Paradigm*, (Colorado : Westview Press), 1981.
- Crouch, Harold, *Militer dan Politik di Indonesia*, terj., (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), 1986.
- Darwis, Ellyasa K.H. (ed.), *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta : LKIS), 1994.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren : Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta : LP3ES), 1982.
- Dirdjosanjoto, Pradjarta, *Memelihara Umat : Kyai Pesantren – Kyai Langgar di Jawa*, (Yogyakarta : LKiS), 1999.
- Dreyer, Edward C. and Rosenbaum, Walter A. (eds.), *Political Opinion and Political Behavior : Essays and Studies*, third edition, (California : Wadsworth Publishing Company Inc.), 1976.
- Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta : Paramadina), 1998.
- Escobar, Arturo, *Encountering Development : The Making and Unmaking of The Third World*, (Princeton NJ : Princeton University Press), 1995.
- Fealy, Greg, *Ulama and Politics in Indonesia: A History of Nahdlatul Ulama 1952-1967*, Ph.D. Dissertation, Department of History, Monash University, 1998.
- Feillard, Andree, *NU fis-a-fis Negara : Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, (Yogyakarta : LKIS), 1999.
- Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Ithaca : Cornell University Press), 1961.

- \_\_\_\_\_, *The Indonesian Elections of 1955*, Interim Report Series, Modern Indonesia Project Southeast Asia Program, (Ithaca & New York : Cornell University Press), 1971.
- \_\_\_\_\_, dan Lance Castles (eds.), *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965*, (Jakarta : LP3ES), 1988.
- Gaffar, Afan, *Javanese Voters : A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press), 1992.
- Geertz, Clifford, *The Religion of Java*, (New York : The Free Press of Glencoe), 1964.
- \_\_\_\_\_, *Peddlers and Prinmces : Social Change and Economis Modernization in Two Indonesian Town*, (Chocago and London : The University Chicago Press), 1963.
- Haidar, M. Ali, *Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia : Pendekatan Fikih dalam Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), 1994.
- Halim, K.H. Abdul, *Sedjarah Perdjuangan Kjai Abdul Wahab Chasbullah*, (Bandung : Penerbit Baru), 1970.
- Haris, Syamsuddin, *PPP dan Politik Orde Baru*, (Jakarta : PT. Grasindo), 1991.
- Harvey, Barbara S., *Permesta : Pemberontakan Setengah Hati*, (Jakarta : Grafiti), 1984.
- Hefner, Robert W., *ICMI dan Perjuangan Menuju Kelas Menengah Indonesia*, terj., (Yogyakarta : Tiara Wacana), 1995.
- Hill, Hal, *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*, terj., (Jakarta : LP3ES), 1991.
- \_\_\_\_\_, (ed.), *Indonesia's New Order : The Dynamics of Socio-Economic Transformation*, (New South Wales : Allen & Unwin Pty. Ltd.), 1994.
- Hitti, Philip K., *Arab History*, alih bahasa H. Hutagalung dan ODP. Sihombing, (Bandung : Van Hoeve), 1953.

- Ida, Laode, *Anatomi Konflik NU, Elit Islam dan Negara*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan), 1996.
- Irsyam, Mahrus, *Ulama dan Politik : Upaya Mengatasi Krisis*, (Jakarta : Yayasan Perkhidmatan), 1984.
- Ismail, Faisal, *Ideologi, Hegemoni dan Otoritas Agama : Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, (Yogyakarta : Tiara Wacana), 1999.
- Jackson, Karl D. and Pye, Lucian W. (eds.), *Political Power and Communications in Indonesia*, (Barkeley and Los Angeles : University of California Press), 1978.
- Kahin, George McTurnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, (Ithaca : Cornell University Press), 1952.
- Kamal, Muhammad Hasan; *Modernisasi Indonesia : Respon Cendekiawan Muslim*, (Jakarta : Lingkar Studi Indonesia), 1987.
- Karim, Abdul Gaffar, *Metamorfosis : NU dan Politisasi Islam Indonesia*, (Yogyakarta : LKIS), 1995.
- Karim, M. Rusli, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia : Sebuah Potret Pasang Surut*, (Jakarta : Rajawali Pers), 1983.
- Kartodirdjo, Sartono (ed.), *Elite Dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta : LP3ES), 1981.
- \_\_\_\_\_, *Pemberontakan Petani di Banten 1888*. (Jakarta : Pustaka Jaya), 1984.
- Kholidy, Mustofa dan Farukh, Umar A., *Al-Tabsyir wa'al-Isti'mar*, alih bahasa Tk. H. Ismail Ya'kub, (Surabaya : CV. Mizan), 1953.
- Korver, A.P.E., *Sarekat Islam : Gerakan Ratu Adil ?*, terj., (Jakarta : Grafiti Pers), 1985.
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung : Mizan), 1991.
- \_\_\_\_\_, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Yogyakarta : Shalahuddin Press dan Pustaka Pelajar), 1994.
- Latief, Hasjim, *Nahdlatul Ulama Penegak Panji Ahlussunnah wal Jama'ah*, (Surabaya : Pengurus NU Wilayah Jawa Timur), 1979.

- Leirissa, R.Z., *PRRI-Permesta : Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, (Jakarta : Grafiti), 1996.
- Lev, Daniel S., *The Transition To Guided Democracy : Indonesian Politics 1957-1959*, (Ithaca : Cornell Modern Indonesian Project), 1966.
- Liddle, R. William, *Pemilu-Pemilu Orde Baru : Pasang Surut Kekuasaan Politik*, (Jakarta : LP3ES), 1992.
- \_\_\_\_\_, *Islam, Politik dan Modernisasi*, (Jakarta : Sinar Harapan), 1997.
- Lipset, Seymour Martin (ed.), *The Encyclopedia of Democracy*, Vol. III, (Washington : Congressional Quarterly Inc.), 1995.
- Ma'arif, A. Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan : Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*, (Jakarta : LP3ES), 1985.
- \_\_\_\_\_, *Islam dan Politik : Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Jakarta : Gema Insani Press), 1996.
- Ma'sum, Saifullah (ed.), *Karisma Ulama : Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, (Bandung : Mizan), 1998.
- MacFarling, Ian, *The Dual Function of The Indonesian Armed Forces : Military Politics in Indonesia*, (Australian Defends Studies Centre), 1996.
- Madjid, Nurcholish, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, (Bandung : Mizan), 1987.
- Mahfudz, Maksoem, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama*, (Surabaya : Yayasan Kesejahteraan Umat), 1982.
- Marijan, Kacung, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*, (Jakarta : Penerbit Erlangga), 1992.
- Masbuchien, *Nahdlatul Ulama di Tengah Rakyat dan Bangsa Indonesia*, (Kebumen : Daya Bakti), 1967.
- Mas'oed, Mohtar, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, terj., (Jakarta : LP3ES), 1989.

- \_\_\_\_\_, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 1994.
- \_\_\_\_\_, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 1994.
- Mawardi, Chalid, *Practica Politica Nahdlatul Ulama : Mendayung di Tengah Gelombang*, (Jakarta-Surabaya : Yayasan Pendidikan Practica), 1967.
- Mortimer, Rex, *Indonesian Communism Under Soekarno : Ideology and Politics*, (Ithaca : Cornell University Press), 1974.
- Muhaimin, Yahya A., *Bisnis dan Politik : Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, (Jakarta : LP3ES), 1991.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, (Yogyakarta : Sipress), 1992.
- Musthofa, Bisyr, *Risalah Ahlussunnah wal Jama'ah*, (Kudus : Menara Kudus), 1966.
- Nakamura, Mitsuo, *Agama dan Perubahan Politik : Tradisionalisme Radikal NU di Indonesia*, terj., (Surakarta : Hapsara), 1982.
- Nasution, Adnan Buyung, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia : Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*, (Jakarta : Grafiti), 1995.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam*, (Jakarta : Yayasan Penerbit UI), 1972.
- \_\_\_\_\_, *Pembaharuan Dalam Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang), 1975.
- Niel, Robert van, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, alih bahasa Zahara Deliar Noor, (Jakarta : Pustaka Jaya), 1984.
- Noor, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, terj., (Jakarta : LP3ES), 1980.
- \_\_\_\_\_, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945 -1965*, (Jakarta : Grafiti Press), 1987.
- Rahardjo, M. Dawam (ed.), *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta : LP3ES), 1983.
- Ramage, Douglas E., *Politics in Indonesia : Democracy, Islam and The Ideology of Tolerance*, (London and New York : Routledge), 1995.

- Robison, Richard, *Indonesia : The Rise of Capital*, (Sydney : Allen & Unwin Pty. Ltd.), 1986.
- \_\_\_\_\_, *Power and Economy in Suharto's Indonesia*, (Manila : Journal of Contemporary Asia Publishers), 1990.
- Samego, Indria et.al., *Bila ABRI Berbisnis*, (Bandung : Mizan), 1998.
- \_\_\_\_\_ dan Basyar, M. Hamdan (eds.), *Peran Sospol ABRI : Masalah dan Prospeknya*, (Jakarta : PPW-LIPI), 1997.
- Sanit, Arbi, *Sistem Politik Indonesia : Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, (Jakarta : Rajawali), 1981.
- Santoso, Priyo Budi, *Birokrasi Pemerintah Orde Baru : Perspektif Kultural dan Struktural*, (Jakarta : Rajawali Pers), 1993.
- Schwarz, Adam, *A Nation in Waiting : Indonesia in the 1990s*, (New South Wales : Allen and Unwin), 1994.
- Shiddiq, Achmad, *Islam, Pancasila dan Ukhuwah Islamiyah*, (Jakarta : Sumber Barokah/Lajnah Ta'lif Wan Nasyr PBNU), 1985.
- \_\_\_\_\_, *Khittah Nahdliyah*, (Surabaya : Balai Buku), 1979.
- Shihab, Alwi, *Membendung Arus : Respon Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung : Mizan), 1998.
- Shiraishi, Takashi, *An Age in Motion : Popular Radicalism in Java, 1912- 1926*, (Ithaca : Cornell University Press), 1990.
- Simanjuntak, Marsillam, *Pandangan Negara Integralistik*, (Jakarta : Grafiti), 1994.
- Sitompul, Einar Martahan, *NU dan Pancasila : Sejarah dan Peranan NU dalam Perjuangan Umat Islam Dalam Rangka Penerimaan Pancasila Sebagai Satu-Satunya Asas*, (Jakarta : Sinar Harapan), 1989.
- Smith, Donald Eugene, *Agama dan Modernisasi : Suatu Kajian Analitis*, terj., (Jakarta : Rajawali Pers), 1985.
- Soebagio I.N., *K.H. Masjkur*, (Jakarta : Gunung Agung), 1982.



- Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid II, (Jakarta : Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi), 1964.
- Sonhadji, Musthofa, *Nahdlat al-Ulama Gerakan Sosial Keagamaan 1926-1952 Suatu Tinjauan Historis Kultural*, tesis M.A., Fakultas Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1988.
- Stange, Paul, *Politik Perhatian : Rasa Dalam Kebudayaan Jawa*, (Yogyakarta : LKiS), 1998.
- Stanley (ed.), *Bayang-Bayang PKI*, (Jakarta : ISAI), 1995.
- Steenbrink, Karel, *Pesantren, Madrasah, Sekolah : Pendidikan Islam Kurun Modern*, (Jakarta : LP3ES), 1986.
- \_\_\_\_\_, *Kawan dalam Pertikaian : Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia (1596-1942)*, (Bandung : Mizan), 1995.
- Stoddard, Lothrop, *The World of Islam*, alih bahasa Panitia, (Jakarta : Panitia), 1966.
- Sudarsono, Juwono (ed.), *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik : Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Gramedia), 1985.
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta : LP3ES), 1985.
- Sundhaussen, Ulf, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 : Menuju Dwifungsi ABRI*, terjemahan, (Jakarta : LP3ES), 1986.
- Suryadinata, Leo, *Golkar dan Militer : Studi Tentang Budaya Politik*, terj., (Jakarta : LP3ES), 1992.
- Syahrastani, *Al-Milal wa al-Nihal*, (Beirut : Dar al-Ma'arif), 1975.
- Tanter, Richard dan Young, Kenneth (eds.), *Politik Kelas Menengah Indonesia*, terj., (Jakarta : LP3ES), 1993.
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta : Gema Insani Press), 1996.
- Thahir, H. Anas (ed.), *Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia*, (Surabaya : PC NU Kodya Surabaya), 1980.



Vatikiotis, Michael R.J., *Indonesian Politics Under Suharto : Order, Development and Pressure of Change*, (London and New York : Routledge), 1993.

Wahid, Abdurrahman, *Muslim di Tengah Pergumulan*, (Jakarta : Leppenas), 1991.

\_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Pesantren*, (Jakarta : Dharma Agung), 1984.

Wajdi, M. Farid, *Dairah al-Ma'arif*, Jilid V, Kairo, 1956.

Ward, Kenneth E., *The 1971 Election : An East Java Case Study*, (Clayton : Monash University Press), 1974.

Yamin, Muhammad, *Tatanegara Majapahit II*, (Jakarta : Yayasan Prapanca), 1968.

Yusuf, Slamet Effendi (et.al.), *Dinamika Kaum Santri : Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal Nahdlatul Ulama*, (Jakarta : Rajawali), 1983.

Ziemek, Manfred. *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta : P3M), 1986.

Zuhri, Saifuddin. *Berangkat Dari Pesantren*, (Jakarta : Gunung Agung), 1987.

\_\_\_\_\_, *Al Maghfurlah K.H. Abdul Wahab Chasbullah Bapak Pendiri NU*, (Jakarta: Yamunu), 1976.

\_\_\_\_\_, *Kaleidoskop Politik Indonesia*, (Jakarta : Gunung Agung), 1981.

\_\_\_\_\_, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya*, (Bandung : Al- Maarif), 1979.

### **Jurnal dan Makalah**

Abdalla, Ulil Abshar, "Umat Islam dan Politik Representasi", *Ulumul Qur'an*, No. 2, 1995

Abdullah, Taufik, "Pemikiran Islam di Nusantara Dalam Perspektif Sejarah : Sebuah Sketsa", *Prisma*, No. 3, 1991.

\_\_\_\_\_, "Peta Permasalahan Pola Kepemimpinan Umat Islam di Indonesia", *Pesantren*, No. 1, Vol. III, 1986.

- Al-Barsany, Noer Iskandar, "Bingkai Pemaknaan Ulang Ahlussunnah wal Jama'ah", *makalah untuk Bahtsul Masail tentang Aswaja oleh Lajnah Bahtsul Masail PBNU*, 15 September 1996.
- Ali, Fachry, "Keharusan Demokratisasi Dalam Islam Indonesia", *Ulumul Qur'an*, No. 1, Vol. VI, 1995.
- \_\_\_\_\_, "Akomodasi Non-Politik Islam Indonesia dalam Struktur Orde Baru", *Prisma*, No. 3, 1991.
- \_\_\_\_\_, dan Saimima, Iqbal Abdurrauf, "Merosotnya Aliran Dalam Partai Persatuan Pembangunan", *Prisma*, No. 12, 1981.
- Anwar, M. Syafi'i, "ICMI dan Politik : Optimisme dan Kekhawatiran", *Ulumul Qur'an*, No. 1, Vol. VI, 1995.
- Asfar, Muhammad, "Pergeseran Otoritas Kepemimpinan Politik Kiai", *Prisma*, No. 5, 1995.
- Bahasoan, Awad, "Golongan Karya Mencari Format Politik Baru", *Prisma*, No. 12, 1981.
- \_\_\_\_\_, "Gerakan Pembaharuan Islam : Interpretasi dan Kritik", *Prisma*, No. Ekstra, 1984.
- Billah, M.M., "Elit-Ideologis dan Kelompok Kepentingan di Masyarakat Indonesia Mutakhir (Sekilas Gambaran Perubahan Sosio-Ekonomi-Politik Dalam Konteks Negara dan Masyarakat Sipil)", *makalah untuk Sarasehan Generasi Muda Nahdlatul Ulama V, di Pondok Pesantren Arjo Winangun Cirebon, 10-12 Juni 1994*.
- Burhan, Umar, "Hari-Hari Sekitar Lahirnya NU", *Aula*, No. 2, Th. III, Januari 1981.
- Dhofier, Zamakhsyari, "K.H.A. Wahid Hasyim : Rantai Penghubung Peradaban Pesantren dengan Peradaban Indonesia Modern", *Prisma*, No. 8, 1984.
- \_\_\_\_\_, "Santri-Abangan dalam Kehidupan Orang Jawa : Teropong dari Pesantren", *Prisma*, No., 1984.
- Effendy, Bahtiar, "Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia", *Prisma*, No. 5, 1995.

- Fatah, R. Eep Saefulloh, "Manajemen Konflik Politik dan Demokratisasi Orde Baru", *Ulumul Qur'an*, No. 5 & 6, Vol. V, 1994.
- Gaffar, Afan, "Islam dan Politik dalam Era Orde Baru: Mencari Bentuk Artikulasi yang Tepat", *Ulumul Qur'an*, No. 2, Vol. IV, 1993.
- Geertz, Clifford, "The Javaness Kiyayi : The Changing Role of A Cultural Broker", dalam *Comparative Studies in Societies and History*, Vol. 2. No. 2, 1960.
- Haidar, M. Ali, "Implikasi Modernitas Terhadap Gerakan Sosial Keagamaan NU", *makalah* untuk Seminar "Masa Depan NU Sebagai Gerakan Sosial Keagamaan", Jakarta, 1994.
- Hefner, Robert W., "Modernity and The Challenge of Pluralism : Some Indonesian Lessons", *paper* presented for Conference "Religion and Society in The Modern World : Islam and Society in Southeast Asia, (Jakarta : LIPI-IAIN Syarif Hidayatullah-AMINEF), 1995.
- Hikam, Muhammad A.S., "Negara, Masyarakat Sipil dan Gerakan Keagamaan Dalam Politik Indonesia", *Prisma*, No. 3, 1991.
- \_\_\_\_\_, "Khittah dan Penguatan Civil Society di Indonesia : Sebuah Kajian Historis Struktural Atas NU Sejak 1984", *makalah*, Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PEP-LIPI), Jakarta, 1994.
- Huntington, Samuel P., "Political Development and Political Decay", *World Politics*, Vol. 17, 1965.
- Ida, Laode, "Kembali ke Khittah 1926 : Membangun Gerakan Politik Kultural NU", *Prisma*, No. 5, 1995.
- \_\_\_\_\_, "Pergulatan Gerakan dan Identitas NU", *Ulumul Qur'an*, No. 5, Vol. VI, 1996.
- Imawan, Riswandha, "Peranan Organisasi Massa dan Organisasi Politik", *Prisma*, No. 4, 1992.
- Irsyam, Mahrus, "Islam di Indonesia : Pengembangan Organisasi dan Gerakan Pemikiran", *Prisma*, No. 4, 1990.

- Kaisiepo, Manuel, "Dilema Partai Demokrasi Indonesia : Perjuangan Mencari Identitas", *Prisma*, No. 12, 1981.
- Karim, M. Rusli, "Konflik Islam Kontemporer di Indonesia : Berbagai Variasi dan Kerumitannya" *Prisma*, No. 5, 1995.
- Kusumowidagdo, Sigid Putranto, "Pembangunan Politik Orde Baru Menghadapi Krisis Partisipasi", *Prisma*, No.1, 1983.
- Liddle, R. William, "Religion As A Political Resource in An Authoritarian Regime : ICMI and The Future of Islamic Politics in Indonesia", *unpublished paper*, The Ohio State University, t.t..
- Ma'arif, A. Syafi'i, "Islam dan Konstitusionalisme : Pengalaman Indonesia", *Prisma*, No. Ekstra, 1984.
- Madjid, Nurcholish, "Suatu Tatapan Islam terhadap Masa Depan Politik Indonesia", *Prisma*, No. Ekstra, 1984.
- Magenda, Burhan D., "Perubahan dan Kesenambungan dalam Pembelahan Masyarakat Indonesia", *Prisma*, No. 4, 1990.
- Malley, Michael S., "Soedjono Hoemardani dan Orde Baru : Aspri Presiden Bidang Ekonomi 1966-1974", *Prisma*.
- Marijan, Kacung, "Respon NU Terhadap Pembangunan Politik Orde Baru", *Jurnal Ilmu Politik*, No. 9, 1991.
- Mas'oed, Mohtar, "Restrukturisasi Masyarakat Oleh Pemerintah Orde Baru di Indonesia", *Prisma*, No. 7, 1989.
- Mas'udi, Masdar Farid, "NU dan Teologi al-Asy'ari : Kajian Melalui al-Ibanah an Ushul al-Diyanah", *Pesantren*, No. 4, Vol. III, 1986.
- Mudatsir, Arief, "Subchan ZE : Buku Menarik yang Belum Selesai", *Prisma*, No. 10, 1983.
- \_\_\_\_\_, "Dari Situbondo Menuju NU Baru : Sebuah Catatan Awal", *Prisma*, No. Ekstra, 1984.
- \_\_\_\_\_, "Subchan ZE Dalam Konstelasi Politik Pasca 1965", *Prisma*.

- Munhanif, Ali, "The Khittah of 1926 Reexamined : Views of The NU in Post-Cipasing Congress", *Studia Islamica (Indonesian Journal for Islamic Studies)*, Vol. 3, No. 2, 1996.
- Muzani, Saiful, "Islam Dalam Hegemoni Teori Modernisasi : Telaah Kasus Awal", *Prisma*, No. 1, 1993.
- \_\_\_\_\_, "Kultur Kelas Menengah dan Kelahiran ICMI", *Studia Islamica*, No. 1, April-Juni, 1994.
- Pranowo, M. Bambang, "Islam dan Pancasila : Dinamika Politik Islam di Indonesia", *Ulumul Qur'an*, No. 1, Vol. III, 1992.
- Rahardjo, M. Dawam, "Angkatan Bersenjata Sebagai Kekuatan Politik", *Prisma*, No. 12, 1981.
- \_\_\_\_\_, "Basis Sosial Pemikiran Islam di Indonesia Sejak Orde Baru", *Prisma*, No. 3, 1991.
- \_\_\_\_\_, "NU Dalam Perspektif Gerakan Sosial Keagamaan", *makalah* untuk Seminar "Masa Depan NU sebagai Gerakan Sosial Keagamaan", Jakarta, 1994.
- Ridwan, Mudjib, "Si Pencipta Nama NU", *Aula*, No. 2 Th. III, 1981.
- Robison, Richard, "Kesenjangan Antara Modal Golongan Ekonomi Kuat dan Lemah di Indonesia", *Prisma*, No. 5, 1985.
- Siradj, Sa'id Aqiel, "Ahlussunnah wal Jama'ah", *makalah* untuk Bahtsul Masail tentang Aswaja oleh Lajnah Bahtsul Masail PBNU, 15 September 1996.
- Suaedy, Ahmad et.al. (Tim LKIS), "Nahdlatul Ulama : Perjalanan Organisasi Islam Tradisional", *Basis*, No. 05-06, Agustus, Tahun ke-45, 1996.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, "Gerakan Sosial Keagamaan Nahdlatul Ulama Dalam Perspektif Historis", *makalah* untuk Seminar "Masa Depan NU Sebagai Gerakan Sosial Keagamaan", Jakarta, 1994.
- Wahid, Abdurrahman, "Agama, Ideologi dan Pembangunan", *Prisma*, No. 11, 1980.

- \_\_\_\_\_, "Massa Islam Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", *Prisma*, No. Ekstra, 1984.
- \_\_\_\_\_, "Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia Dewasa Ini", *Prisma*, No. 4, 1984.
- \_\_\_\_\_, "Reideologisasi dan Retradisionalisasi dalam Politik", *Prisma*, No. 6, 1985.
- \_\_\_\_\_, "Reinterpretasi Aswaja : Antara Tradisi dan Doktrin", *makalah* untuk "Sarasehan Generasi Muda NU V", Jakarta, 10-12 Juni 1994.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

### A. Identitas

Nama : H. Musthofa Sonhadji  
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 1 Maret 1945  
Nama Ayah : K.H. Sonhadji  
Nama Ibu : Hj. Mariyatun  
Pekerjaan / Jabatan : Dosen pada STAIN Kudus / Pembina Utama Muda /  
Lektor Kepala / IV C  
NIP : 150 170 119  
Alamat : Panjunan Wetan No. 383 Kudus  
Telp. (0291) 439238

### B. Pendidikan

1. Madrasah Islamiyyah Nawawiyah Rembang Lulus Tahun 1956
2. Sekolah Rakyat Negeri Rembang Lulus Tahun 1958
3. SMP Islam Rembang Lulus Tahun 1959
4. KMI Pondok Modern Gontor Ponorogo Lulus Tahun 1964
5. Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus Tahun 1973
6. Pascasarjana (S-2) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus Tahun 1988
7. Pascasarjana (S-3) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam proses ujian promosi Doktor

### C. Pendidikan Non-Formal, Pelatihan, dan Seminar

1. Santri pada berbagai Pondok Pesantren di Rembang, Lasem, Kediri, Jombang, dan Yogyakarta
2. Post-Graduate Course (PGC) di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1973



3. Studi Purna Sarjana (SPS) di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1977-1978
4. BPA di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 1973
5. Kursus Intensif Bahasa Inggris di UGM Yogyakarta Tahun 1972
6. Pelatihan Penelitian Sejarah di IAIN Walisongo Semarang Tahun 1994
7. Penataran P-4 Tingkat Nasional di Jakarta Tahun 1993
8. Penyegaran Metodologi Penelitian Agama di Semarang Tahun 1993
9. Seminar Nasional "Agama dan Ketahanan Nasional" di Jakarta Tahun 1994
10. Seminar Nasional "Pemberdayaan Legeslatif" di Jakarta Tahun 1994
11. Seminar Nasional "Penanggulangan Kemiskinan dan Kelainan Psikopatik" di AKPOL Semarang Tahun 1993
12. Seminar Internasional "Islam and Social Sciences" di Universitas Kebangsaan Malaysia Tahun 1990
13. Seminar Internasional "Islamisation of Sciences" di Universitas International Kualalumpur Malaysia Tahun 1992
14. Seminar Internasional "Religion and Environment" di Semarang Kerjasama antara IAIN Walisongo, UKSW Salatiga dan Universitas Thamassat Bangkok Tahun 1994

#### **D. Jabatan (Formal dan Non-Formal)**

1. Sekretaris Fakultas Da'wah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1970-1973
2. Pembantu Dekan Bagian Akademik Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Kudus Tahun 1978-1980
3. Pembantu Dekan Bagian Kemahasiswaan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Kudus Tahun 1980-1983
4. Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Kudus Tahun 1987-1991 dan 1991-1994

5. Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Surakarta Tahun 1992-1994
6. Pembantu Rektor Bagian Akademik Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Jepara Tahun 1987-1994
7. Wakil Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah
8. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ittihadul Muballighin
9. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)
10. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Daerah Kabupaten Kudus Tahun 1999

